

Cab. Bandung

Aromania
perfumery

Refill Parfume

TERAS



SATWA DILINDUNGI: Barang Bukti kulit harimau yang berhasil diamankan polisi dari tiga tersangka.

Tiga "Pemburu" Harimau Ditahan

Amankan Kulit dan Organ Harimau

BENGKULU - Tim Subdit Tipidter Direktorat Reskrim Umum Polda Bengkulu melakukan penahanan terhadap tiga pria, tersangka perburuan satwan dilindungi jenis Harimau Sumatera (*panthera tigris sumatrae*). Tersangka, masing-masing Bambang dan Ogi, warga Desa Tanjung Ganti Kecamatan Padang Guci Kaur, serta Samsul Bahri warga Desa Rantau Panjang Kecamatan Semidang Alas Seluma.

Mereka sebelumnya ditangkap Tim Subdit Tipidter di Jalan Raya Bengkulu-Manna. Tepatnya di Desa Sulauwangi, Kecamatan Sulau Kabupaten Bengkulu Selatan, Senin (21/12) malam sekitar pukul 23.15 WIB. Dalam penangkapan itu, polisi berhasil mengamankan kulit lengkap seekor harimau, dan sejumlah organ dalam harimau.

► Baca **TIGA...**Hal 7



TRI RISMAHARINI

Pekerjaan Menkes Baru Tidak Hanya Covid-19

Risma Siap Benahi Data Penerima Bansos

JAKARTA - Budi Gunadi Sadikin kemarin (22/12) ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan. Ada berbagai catatan untuk menteri kesehatan baru tersebut. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) bukan masalah satu-satunya yang harus dihadapi Budi.

Tugas utama Budi tentu saja mengatasi pandemi Covid-19. Dia tidak banyak berbicara mengenai teknisnya. Melainkan hanya menyatakan bahwa kementerian kesehatan tidak bisa sendirian mengatasi pandemi. "Kita harus melakukannya secara inklusif," terangnya. Harus ada gerakan bersama seluruh masyarakat Indonesia.

► Baca **PEKERJAAN...**Hal 7

LET'S GO TOGETHER

Agung TOYOTA

INDULGE IN THE THRILL

IN CHARGE OF BETTER FUTURE

COROLLA CROSS TWO SIDES OF THE FINEST

GASOLINE

HUBUNGI : **AGUNG TOYOTA**
BENGKULU - Jl. P. Natadirdja No.103 Telp. 0736 - 21127
HOTLINE BENGKEL : 0736 - 23036
BOOKING SERVIS : 08537776873

Lindungi Hak Profesi Dokter Hewan

BENGKULU - Profesi dokter hewan memiliki tugas dan peran yang berat. Keberadaannya tidak hanya berhubungan dengan hewan atau ternak, tetapi juga erat kaitannya dengan lingkungan dan manusia. Untuk itu dibutuhkan perlindungan hukum untuk para dokter hewan dalam menjalankan tugas profesinya.

"Profesi dokter hewan sangat rentan dan sering kali berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum," kata Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat membuka Web Seminar (Webinar) dengan tema "Peran dan Tantangan Advokat di Era Society 5.0". Serta penandatangan perjanjian antara Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Bengkulu secara virtual, kemarin (22/12).

Menurut Rohidin tugas dan tanggung jawab dokter hewan itu sesungguhnya sangat luas dan sangat kompleks. Profesi dokter hewan pun sangat rentan dan sering kali berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Untuk itu Rohidin menyambut baik kerja sama antara PDHI dan teman-teman Peradi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.

► Baca **LINDUNGI...**Hal 7

IKUTI: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengikuti webinar dan penandatanganan Peradi dengan PDHI Cabang Bengkulu secara virtual, kemarin (22/12).

Belajar Tatap Muka

BATAL

Kasus Bertambah Jadi 3.150 Positif

BENGKULU - Rencana sekolah melaksanakan kegiatan belajar tatap muka di awal tahun 2021, tampaknya sulit terealisasi. Seiring terus meningkatnya kasus positif Covid-19 di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Sekalipun ada lampu hijau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), mempersilakan sekolah dibuka kembali, asal persetujuan pemerintah setempat.

Kota Bengkulu sudah memastikan tak ada kegiatan belajar tatap muka. Sebagaimana ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Dra. Rosmayetti, MM. "Meningkatnya kasus covid di Kota Bengkulu, sangat berisiko bila sekolah menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Sekalipun kita akui pembelajaran tatap muka lebih efektif. Tetapi kesehatan siswa lebih utama," kata Rosmayetti.

► Baca **BELAJAR...**Hal 7

PETA PERSEBARAN COVID-19 PROVINSI BENGKULU

Kota/Kabupaten	Zona	Positif	Sembuh	Meninggal Dunia
Bengkulu	Merah	1.680	1.052	69
Rejang Lebong	Merah	435	348	8
Kepahiang	Merah	233	166	5
Bengkulu Utara	Merah	212	140	9
Mukomuko	Merah	192	107	3
Bengkulu Tengah	Merah	128	61	2
Seluma	Oranye	98	63	8
Kaur	Oranye	74	47	-
Bengkulu Selatan	Oranye	66	34	3
Lebong	Oranye	32	33	1



PENYERAHAN: Tiga Kantor Akuntan Publik menyerahkan hasil audit dana kampanye Paslon Pilgub Bengkulu yang diterima Anggota KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, kemarin (22/12).

Gugatan ke MK, Siap Bukti

BENGKULU - Pengajuan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon (paslon) nomor urut 3 Agusrin-Imron telah diregistrasi. Dengan gugatan nomor 79. PAN.MK/AP3/12/2020. Salah satu tim hukum Agusrin-Imron, M. Zetriansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah siap dengan bukti-bukti yang memperkuat gugatan kliennya itu.

"Insyaa Allah besok kita lengkapi semua. Kalau selesai besok, akan keluar akta permohonan lengkap. Kalau bukti Insyaa Allah sudah lengkap," sebut Zetriansyah.

Dikatakannya, dalam gugatan ada dua poin besar. Pertama, pihaknya mendalilkan bahwa ada seratus ribu penggelembungan suara yang diduga dilakukan oleh salah satu paslon. Kedua, menduga ada enam puluh ribu suara untuk paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron yang dirusak. "Dari hitungan kita ada suara kita 34 persen, Helmi-Muslihan 33 persen dan Rohidin itu 32 persen. Kita juga minta paslon nomor urut 2 didiskualifikasi karena diduga melibatkan oknum ASN, dan menggunakan fasilitas negara," jelasnya.

► Baca **GUGATAN...**Hal 7

Patuhi Protokol Kesehatan

#DENGAN

SELALU GUNAKAN MASKER

Pemerintah Subsidi Rp 7 Ribu

Tunggakan Peserta Mandiri Rp 11 T

JAKARTA— Tahun depan iuran peserta BPJS Kesehatan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) dan bukan pekerja (BP) kelas 3 tidak jadi naik. Sebab pemerintah tetap memberikan bantuan iuran kepada peserta segmen tersebut.

Deputi Direksi Bidang Manajemen Iuran BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Ratna Sudewi kemarin (22/12) menuturkan pemerintah masih menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBBU dan BP kelas 3. Peserta PBBU dan BP kelas 3 hanya membayar iuran Rp35.000 dari yang seharusnya Rp42.000. "Sisanya pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000," ungkapnya.

Dia juga menjelaskan bahwa peserta PBBU ini tergolong banyak menunggak. Hingga November lalu, tunggakannya mencapai Rp 11 triliun. Itu tunggakan dari kelas 1 hingga 3 peserta PBBU atau mandiri.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan di tahun 2020, Pemerintah sudah memberikan bantuan iuran bagi peserta PBBU-BP kelas 3 yang berstatus aktif. Selain itu juga untuk bantuan iuran bagi peserta yang didaftarkan oleh pemerintah di daerah. "Sampai dengan saat ini, realisasi bantuan iuran JKN-KIS ini mencapai Rp 2,7 triliun," ujarnya.

Tahun depan, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk bantuan iuran PBBU-BP kelas 3 sebesar Rp 2,4 triliun. "Secara keseluruhan Pemerintah telah menyiapkan alokasi anggarannya sebesar Rp 51,2 triliun atau 30,1 persen dari anggaran kesehatan 2021 untuk Program JKN-KIS," ungkapnya. Hal itu termasuk didalamnya bantuan iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar 96,8 juta jiwa dengan anggaran Rp 48,8 triliun.

Dia juga menjelaskan, skema Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) kini sudah berorientasi pada kesehatan.

Fokusnya pada aspek kesehatan seperti bantuan iuran program JKN-KIS, optimalisasi program promotif dan preventif kesehatan, upaya penurunan stunting, dan penanganan Covid-19.

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. "DBHCHT juga dialokasikan untuk kesejahteraan petani dan buruh tembakau, serta penegakan hukum," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril mengungkapkan Pemerintah dan BPJS Kesehatan harus mengimplementasikan hal-hal yang diatur dalam Perpres 64/2020. Madril mengungkapkan dalam Perpres itu memperhatikan dua asas utama yaitu asas proporsionalitas dan asas kemanfaatan.

"Asas proporsional, bahwa iuran JKN ini harus memperhatikan kemampuan anggaran dan finansial negara. Sementara asas kemanfaatan, adanya kebijakan tersebut ada kemanfaatan bagi publik," tuturnya. (lyn)

Komnas HAM Siapkan Pemeriksaan Ahli

FPI Siap Bantu

JAKARTA— Penyelidikan peristiwa penembakan enam anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih berjalan. Setelah memanggil dan meminta keterangan dari FPI, Polri, dokter, dan pihak terkait lainnya, mereka kembali mendalami temuan-temuan yang sudah diperoleh sejauh ini. Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyebut, hal itu perlu dilakukan sebelum masuk tahap berikutnya.

Pria yang ditugasi memimpin tim penyelidik dalam peristiwa yang terjadi di Jalan Tol Jakarta - Cikampek itu menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal. "Kami sedang melakukan konsolidasi bahan-bahan yang telah kami dapatkan," terangnya dia kemarin (22/12).

Semua itu dilakukan untuk kebutuhan penyelidikan selanjutnya. Setelah memeriksa mobil yang ditumpanginya oleh enam anggota Laskar FPI, Komnas HAM memang masih butuh data lain untuk melengkapi penyelidikan yang mereka lakukan. Di antaranya, pemeriksaan senjata api

yang digunakan dalam peristiwa tersebut.

"Karena ada pernyataan ini senjata ini dan itu senjata itu, kami akan uji dan lain sebagainya," terang Anam. Dia memastikan bahwa timnya sudah memiliki data terkait senjata api yang harus diuji kesesuaiannya dengan fakta yang terjadi di lokasi kejadian. Pemeriksaan senjata api akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

Komnas HAM bukan pertama kali menyelidiki peristiwa yang berhubungan dengan penembakan atau saling tembak. Sebelum mendalami peristiwa di Jalan Tol Jakarta - Cikampek, mereka menyelidiki peristiwa penembakan Pendeta Yeremia Zanamani di Papua. Secara detail, hasil penyelidikan tersebut dibeber kepada publik. Termasuk yang berhubungan dengan senjata api. Secara teknis, Komnas HAM menyampaikan temuan mereka dan menerangkan runutan peristiwa yang terjadi.

Dalam peristiwa yang menyebabkan hilangnya enam nyawa dari anggota Laskar FPI, Komnas HAM diharapkan melakukan hal serupa. "Alhamdulillah sampai

detik ini kami merasakan ada dokumen, informasi, keterangan yang lebih detail, lebih dekat (untuk mengungkap peristiwa tersebut)," beber Anam.

Anam sudah memastikan bahwa timnya bekerja secara independen. Untuk itu, semua pihak yang keterangannya mereka butuhkan dipanggil. "Salah satu kerja human rights investigation adalah menggunakan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan," jelasnya. Untuk itu, keterangan ahli yang dibutuhkan pasti akan masuk dalam data yang dikumpulkan oleh Komnas HAM.

Berkaitan dengan autopsi, Komnas HAM belum memutuskan perlu autopsi ulang atau tidak. Yang pasti, pihak keluarga maupun FPI sudah membuka diri untuk membantu Anam dan kawan-kawannya secara total. "Pada prinsipnya, untuk kebenaran kami akan membantu sepenuhnya keperluan Komnas HAM," beber Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar. Namun demikian, Aziz menambahkan, autopsi yang dilakukan oleh Polri tidak pernah diakui keluarga enam anggota Laskar FPI. (jpg)

Tjoko Tjandra Divonis 2,5 Tahun

Brigjen Prasertjo Tiga Tahun

JAKARTA— Djoko Tjandra harus merasakan jeruji besi lebih lama. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan Djoko Tjandra bersalah serta memberikan vonis dua tahun dan enam bulan untuk kasus surat jalan palsu. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai hukuman itu sudah tepat dan lebih berat dari kasus surat palsu biasanya.

Ketua Majelis Hakim Muhammad Sirat mengatakan, terdakwa Tjoko Tjandra secara sah serta meyakinkan bersalah dalam tindak pidana secara bersama-sama dan berkelanjutan untuk membuat surat palsu. "Menjatuhkan pidana penjara dua tahun dan enam bulan," tuturnya.

Hukuman penjara dua tahun enam bulan itu lebih berat dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta Djoko Tjandra

dihukum penjara selama dua tahun. "Majelis hakim mempertimbangan hal meringankan dan memberatkan," terangnya.

Untuk pertimbangan meringankan, selama persidangan Djoko Tjandra bersikap sopan, usia Djoko Tjandra yang masuk usia lanjut dan terdakwa yang mengakui perbuatannya juga meringankan.

Dalam sidang itu, hakim juga memvonis Brigjen Prasertjo Utomo dengan hukuman penjara yang lebih berat dari Djoko Tjandra. Prasertjo divonis tiga tahun penjara akibat membuat surat jalan palsu. Hal itu dikarenakan Prasertjo dengan sengaja membicarakan Djoko Tjandra yang merupakan buronan Kejaksaan Agung. "Divonis dengan hukuman tiga tahun penjara," tegasnya.

Apalagi, Prasertjo melakukan kejahatan dengan menutup-nutupi atau menghangsurkan barang bukti

berupa surat jalan palsu. "Memerintahkan anak buahnya bernama Johnny Andrianto untuk membawa surat jalan palsu," terang Sirat.

Hal memberatkan lainnya, Prasertjo menggunakan surat jalan palsu sebanyak dua kali. Serta, dalam kedua perjalanan itu tidak menggunakan tes bebas Covid-19 yang artinya, membahayakan kesehatan masyarakat. "Terdakwa juga tidak merasa bersalah dan tidak mengakui perbuatannya," urainya.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan Djoko Tjandra merupakan korban permainan penegak hukum. Bila sejak awal penegak hukum tegas, tidak menawarkan kebebasan dengan putusan bebas, tentu tidak akan seperti ini. "Karena itu, sebenarnya gong kasus ini itu soal kasus suap di PN Tipikor," pungkasnya. (idr)

Tiga "Pemburu" Harimau Ditahan

Sambungan dari halaman 1

Kabid Humas Polda Bengkulu Kombes Pol. Sudarno, S.Sos, MH menjelaskan, penangkapan ketiga tersangka itu berasal dari informasi masyarakat akan ada orang membawa organ dan kulit harimau Sumatera menuju ke Kaur. Personel Subdit Tipidter Dit Reskrimsus bersama Polhut Resor Mukomuko dan Bengkulu Utara melakukan pengintaian di

lokasi yang disebutkan. "Pada Senin sekira Pukul 23.15 WIB, di Jalan Raya Desa Sulawangi, tim gabungan mendapati tiga pengendara sepeda motor melintas. Orang yang dicurigai itu langsung dicegat dan dilakukan pengeledahan. Ditemukan satu karung berisikan tulang atau organ dalam harimau, dan satu karung lainnya berisikan kulit lengkap satu ekor harimau," jelas Sudarno kepada awak media, kemarin (22/12).

Lindungi Hak Profesi Dokter Hewan

Sambungan dari halaman 1

"Dengan kerja sama ini kita harapkan perlindungan hak-hak profesi dokter hewan dapat terlindungi dengan baik. Sekaligus tugas dan tanggung jawab sebagai pemegang amanat profesi pun dapat kita tunaikan secara produktif," papar lulusan kedok-

teran hewan Universitas Gajah Mada (UGM) ini.

Selain itu, Rohidin juga menekankan tiga tugas pokok dokter hewan yang dirasakan betul kehadirannya dalam jajaran pemerintah dan masyarakat. Baik itu dalam penyediaan protein hewani yang baik, berkualitas dan halal. Begitu juga dengan pengendalian penya-

kit zoonosis yang berhubungan dengan penyakit menular antara manusia dan hewan. Termasuk kepentingan kebutuhan dasar manusia, pelestarian domestikasi dan pelayanan kesehatan hewan. "Salam hormat dan rasa cinta saya pada teman-teman seprofesi di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu," demikian Rohidin. (key/rls)

Belajar Tatap Muka Batal

Sambungan dari halaman 1

Awalnya memang dengan adanya surat keputusan bersama (SKB) empat menteri pihaknya telah mempertimbangkan dan mulai merancang skema pembelajaran tatap muka di semester genap Januari 2021. Bahkan sekolah telah meminta persetujuan dari para orangtua siswa. "Sebenarnya kita sudah merancang siswa kembali belajar di sekolah secara tatap muka. Namun dari musyawarah yang telah kita lakukan, diputuskan sekolah tetap daring. Itu juga merujuk SE Walikota Bengkulu terkait larangan keramaian dan penghimpunan orang dalam jumlah besar," jelasnya.

Dengan dibatalkannya pembelajaran tatap muka, Rosmayetti meminta agar sekolah, orang tua untuk bisa menerima keputusan tersebut demi kebaikan bersama. "Kita akan turunkan tim pengawasi ke sekolah-sekolah. Memastikan tidak ada sekolah melaksanakan kegiatan belajar siswa secara tatap muka pascabur semester ini," ujarnya.

Pelaksanaan pembelajaran Daring belum dipastikan sampai kapan dilakukan namun pihaknya akan melihat kondisi. Jika pandemi Covid-19 sudah berangsur menurun, angka kasus positif Covid-19 melandai, maka akan kembali dirancang untuk pelaksanaan belajar tatap muka. "Kita lihat kondisi sampai sudah aman tidak ada lagi peningkatan covid," sampainya.

Terkait bantuan kuota siswa maupun guru dalam pembelajaran daring, Rosmayetti mengatakan bantuan tersebut belum ada lagi. Baik dari Kemendikbud maupun dari pemerintah daerah. "Belum ada informasi dari Kemdikbud, maupun Pemkot," sebutnya.

Di tempat terpisah, Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA menyatakan akan melihat kondisi beberapa minggu ke depan sebelum memutuskan akan mengizinkan sekolah kembali menggelar tatap muka atau tetap daring. "Kita lihat dulu beberapa minggu ke depan. Apakah setelah kebijakan *Work From Home (WFH)* diberlakukan kondisi sudah membaik. Awal tahun juga sekolah belum mulai, masih libur. Nanti kita evaluasi," ujar Rohidin.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menyarankan sekolah yang berada di zona oranye lebih baik belum membuka belajar tatap muka. "Kalau ini pendapat kita dari dinas kesehatan, lebih baik sekolah yang berada di zona merah tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara daring," ujar Herwan.

Zona merah, terangnya, menjadi sebutan bagi daerah dengan kasus tinggi penyebaran Covid-19 sehingga berisiko lebih tinggi terjadi penularan ketika sekolah di daerah tersebut kembali belajar secara tatap muka. Untuk itu bagi kabupaten yang dulunya zona oranye atau kuning yang melaksanakan sekolah tatap muka, lebih

baik menghentikan kegiatan tersebut. Meskipun siswa dihadirkan ke sekolah secara bergantian atau *shift-shifan*.

Berdasarkan peta persebaran Covid-19 Provinsi Bengkulu, tidak ada lagi kabupaten di Provinsi Bengkulu zona hijau bahkan kuning. Semuanya sudah naik menjadi zona oranye (risiko sedang) dan zona merah (risiko tinggi) dengan bertambahnya kasus positif covid secara signifikan.

Sementara itu, per Selasa (22/12) terdapat penambahan 23 kasus positif baru Covid-19. Kasus positif ini berasal dari hasil pemeriksaan sampel yang keluar hasil sebanyak 93 sampel swab. Sehingga total kasus positif Covid-19 di Provinsi Bengkulu menjadi 3.150 orang, dengan diantaranya sebanyak 2.062 orang sudah dinyatakan sembuh.

"Hari ini (kemarin, red) juga terdapat penambahan kasus sembuh sebanyak 40 pasien, dan meninggal dunia 1 pasien. Sehingga total meninggal menjadi 108 orang," ujar Herwan.

Adapun enambahan kasus baru ini berasal dari Kota Bengkulu sebanyak 8 orang, Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 6 orang, Kepahiang sebanyak 1 orang, dan Mukomuko sebanyak 8 orang. "Disiplin terhadap prokes dengan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, menjaga jarak dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun Inshaa Allah kita bisa terhindar virus ini," demikian Herwan. (key)

Gugatan ke MK, Siap Bukti

Sambungan dari halaman 1

Menghadapi gugatan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu melalui komisioner Eko Sugianto, SP, M.Si memastikan pihaknya telah siap. "Paslon nomor urut 3 telah mendaftar ke MK. Kita langsung melakukan rapat koordinasi. Poinnya langsung, karena materi gugatan itu sudah terkonfirmasi maka kita juga sudah bahas dengan beberapa kabupaten," sampainya.

Artinya lanjut Eko, pihaknya sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Termasuk ketika ada dalil, maka pihaknya juga akan menjawab dengan dalil disertai alat bukti akurat yang bisa dibuktikan. "Alat bukti ini yang sekarang lagi kita kejar. Sehingga pada saat persidangan, dokumennya sudah lengkap," ujar Eko.

la menjelaskan dari materi gugatan Agusrin-Imron itu, pihaknya telah menerima informasi bahwa ada dua poin besar dalam gugatan itu. Diantaranya penggugat mendalilkan adanya eksodus pemilih, dan kedua banyak surat suara yang tidak sah. "Dua poin itu. Kalau gugatan secara utuh itu kita belum menerima. Pokok permohonan yang disampaikan ke MK, kita masih menunggu untuk proses selanjutnya," tukasnya.

Selain mengajukan gugatan ke MK, paslon nomor urut 3 juga mengajukan gugatan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. Dengan tuntu-

tan yang serupa. Eko Pebrinaldo, SH selaku kuasa hukum Agusrin-Imron menuturkan pihaknya telah siap melakukan klarifikasi terhadap surat yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu perihal tuntutan kliennya. "Ada beberapa bukti tambahan telah kita sampaikan. Senin kita dapat undangan, tapi posisi saya ada sidang di Kaur. Jadi diundur besok (hari ini, red). Intinya kita siap hadir untuk klarifikasi," jelasnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah, SH, MH, mengatakan pihak akan mengirimkan undangan kepada pelapor untuk dimintai klarifikasi perihal surat yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi Bengkulu. "Rencananya Rabu, karena orang itu saat pemanggilan itu berada di Kaur, jadi belum di klarifikasi," pungkasnya.

Tiga Paslon Patuh

Dibagian lain KPU Provinsi Bengkulu telah menerima hasil audit dana kampanye Pilkada Provinsi Bengkulu dari Kantor Akuntan Publik, kemarin (22/12). Dikatakan Eko Sugianto, direncanakan tanggal 23 sampai 25 Desember nanti akan dilakukan penyampaian hasil audit ini kepada pasangan calon. "Besok (hari ini, red) untuk materinya akan kita umumkan. Sudah ada beberapa penyampaian. Poinnya adalah semuanya patuh. Itu yang disampaikan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik, red)," kata Eko.

Pekerjaan Menkes Baru Tidak...

Sambungan dari halaman 1

Menurut dia, gerakan bersama seluruh elemen masyarakat menjadi kunci bagi penguatan di berbagai sektor kesehatan. Mulai dari membangun sistem layanan kesehatan publik yang kuat dan siap mengatasi problem virus SARS-CoV-2.

Selain itu, juga bisa mempersiapkan sistem layanan kesehatan publik yang siap, kuat, dan mumpuni. "Agar generasi sesudah kita bisa menghadapi SARS-VoV-3, SARS-CoV-4, yang kita tidak tahu kapan datangnya," tambah mantan wakil Menteri BUMN itu.

Dalam menghadapi pandemi ini, CISDI mendorong Budi untuk melakukan reformasi layanan kesehatan primer serta terus menggerakkan upaya tes, lacak kasus, pengobatan, dan isolasi sebagai jalan keluar pandemi. Direktur Kebijakan CISDI Olivia Herlinda menyatakan sepakat dengan Budi. Menurutnya, sektor kesehatan harus menjadi yang terdepan dalam penanganan pandemi. "Menteri Kesehatan harus bisa mengambil alih kepemimpinan secara nasional," ujarnya kemarin.

Untuk itu perlu ada reformasi sistem kesehatan termasuk penguatan layanan kesehatan primer untuk mendorong tidak hanya kesiapan faskes dan distribusi vaksin. Selain itu juga menegakkan surveilans. Selain itu juga perlu test, trace, treatment (3T) serta upaya promotif dan pencegahan di tingkat komunitas dan individual. "Yang tidak kalah penting, kesiapan logistik dan

penerimaan masyarakat terhadap vaksin juga harus diharap secara serius," ucapnya.

Dia berharap dapat melihat perspektif kesiapan sistem sebagai sebuah upaya integral dalam menyelesaikan permasalahan pandemi. "Artinya, transformasi puskesmas dan perspektif kesehatan masyarakat perlu segera diperkuat," katanya.

Selain itu, dia juga meminta menkes baru menetapkan indikator yang jelas sesegera mungkin. Khususnya terkait penurunan jumlah orang sakit dan orang terulur. Indikator ini nantinya akan melindungi tenaga kesehatan dan mampu mengurangi beban kesehatan.

Menteri baru lainnya, Mensos Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya. Risma resmi bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Dia ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Juliari Batubara yang ditahan KPK karena tersandung kasus korupsi.

Risma menjelaskan, meski kemarin presiden memperkenalkan enam menteri baru, namun baru hari ini (23/12) dirinya resmi bekerja. "Baru pelantikan besok (hari ini, red)," ujarnya.

Perempunan 59 tahun itu tidak ingin bersantai. Dia sudah merancang sejumlah program kerja. Setelah dilantik, Risma bakal langsung tancap gas. Ada sejumlah program yang digagas. Pertama, pembenahan data penerima bantuan. Dia berupaya merancang data yang akurat agar presisi. Warga yang benar-benar

Penyerahan hasil audit dana kampanye dilakukan tiga KAP. Yaitu KAP Heliantono dan Rekan yang mengaudit dana kampanye paslon Helmi Hasan - H. Muslihan Diding Soetrismo. Kemudian KAP Sabar dan Rekan yang mengaudit paslon Dr. H. Rohidin Mersyah - Dr. H. Rosjonsyan. Dan KAP Mohammad Yudhitama Alkautsar mengaudit H. Agusrin Maryono - Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, MM, M.Si.

"Jadi ini KAP independen, tidak saling kenal. Begitupun dengan ketiga paslon. Nanti akan ada beberapa kaitan. Akan kita klarifikasi apakah ada sumbangan yang melebihi, atau penyumbang yang tidak jelas identitasnya," imbuhnya.

Untuk itu, audit dana kampanye ini adalah bentuk kepatuhan peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di Provinsi Bengkulu. Dimana ada ketentuan tertentu, diantaranya tentang penyumbang. Dimana ketentuan dari penyumbang yang harus digaris bawahi, penyumbang harus jelas identitasnya. Kemudian penyumbang yang dilarang oleh undang-undang, diantaranya warga negara asing, badan usaha asing, LSM asing, juga pemerintah daerah tidak diperbolehkan.

Dikatakan Eko, apabila paslon dinyatakan menang, namun dari hasil audit dana kampanye ternyata ada penyumbang yang dilarang tadi, konsekuensinya bisa dibatalkan sebagai calon. (war)

membutuhkan bantuan harus mendapatkan penanganan.

Risma yang juga menjabat ketua DPP PDIP bidang kebudayaan menegaskan, membenahi data bukan perkara mudah. Selisih pasti ada. Apalagi, ada penerima bantuan yang meninggal, tetapi belum tercatat. Selain itu, bantuan nanti diberikan dalam bentuk cashless. Tidak lagi berupa pembagian uang tunai. "Pak Presiden meminta langsung transfer ke penerima bantuan," jelasnya.

Risma juga memastikan akan membawa program-program yang berhasil diterapkan di Surabaya. Misalnya, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Dia pun mencontohkan sejumlah program. Di antaranya, peningkatan kesejahteraan nelayan dan perempuan, serta penanganan anak jalanan lewat pembentukan kampung anak negeri. "Tentu saya bakal menggandeng kementerian lain," paparnya.

Peningkatan ekonomi warga juga menjadi perhatian Risma. Seluruh warga harus sejahtera. Hal tersebut bisa diwujudkan melalui program pahlawan ekonomi. Program itu juga telah diterapkan di Surabaya. "Kami akan menggandeng akademisi dan universitas untuk mewujudkannya," terang Walikota Surabaya dua periode ini.

Kepada Jokowi, Risma sudah menyampaikan bahwa tugasnya di Surabaya belum tuntas. Jokowi memberikan keleluasaan. "Nanti saya bolak-balik Surabaya-Jakarta," ungkapnya. (aph/lyn/byu)

PDPK Diangkat Berdasarkan Perda

MUKOMUKO - Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Mukomuko, Drs. H. Bustari Maller, M.Hum menerangkan ribuan pegawai daerah dengan perjanjian kerja (PDPK) atau akrah disebut honorer daerah (Honda), bukan diangkat berdasarkan peraturan bupati (perbup). Namun oleh dasar hukum yang lebih tinggi berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengangkatan PDPK.

"Honda ini bukan dengan perbup lagi dasar hukumnya tapi perda yang merupakan payung hukum tertinggi produk daerah," kata Bustari.

Oleh sebab itu, ia meminta mengenai adanya informasi akan merumahkan Honda terhitung Januari 2021 mendatang, untuk dapat dipertimbangkan kembali. "Jika benar informasi ini, kita minta Bupati dapat mempertimbangkan kembali. Mengingat mereka ini diangkat berdasarkan Perda," kata Bustari.

Terkecuali, lanjutnya, Perda tersebut sudah dicabut. Maka bisa saja diberlakukan kebijakan demikian. Dinyatakannya, jika sudah berupa Perda, maka siapapun pimpinan pemerintah di kabupaten harus melaksanakan ketentuan yang diatur di dalam Perda. Tanpa memandang di era siapa Perda itu dibuat.

"Misal Perda Covid-19, sekarang disahkan Perdanya, siapapun bupati ke depan di Kabupaten Mukomuko, maka harus melaksanakan Perda ini. Begitu juga Perda mengenai pengangkatan Honda ini," jelas Bustari.

Ia berharap, Bupati benar-benar dapat mengkaji kembali jika benar-benar akan menerapkan kebijakan merumahkan tenaga honorer. "Inikan sudah menjadi kebijakan daerah. Siapapun Bupati harus melaksanakan Perda ini," ujarnya.

Maka dari itu, Bustari berharap, ribuan tenaga honorer yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Mukomuko untuk tidak risau. Pasalnya, pengangkatan PDPK dilindungi aturan tertinggi di tingkat daerah yakni Perda. "Bagi tenaga honorer saya berharap jangan risau. Kita berharap juga DPRD bisa mengalokasikan dana untuk gaji tenaga honorer. Kalau anggarannya ada, tidak ada alasan bagi daerah untuk tidak mengangkat tenaga honorer. Selain itu, memang mereka dibutuhkan pemerintah," terangnya. **(huc)**

Menunggu Kelahiran 1.771 Ekor Sapi

MUKOMUKO - Dinas Pertanian (Dispertan) Mukomuko masih deg-degan dengan angka kelahiran sapi. Sampai kemarin, jumlah angka kelahiran sapi baru sebanyak 764 ekor. Masih menunggu sampai akhir tahun, bisa lahir sebanyak 1.771 ekor sapi. Hal disampaikan Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispertan Mukomuko, Warsiman.

"Kami akan terus berusaha, supaya target bisa tercapai. Sekarang ini baru 764 ekor kelahiran. Mudah-mudahan sampai akhir Desember nanti ada penambahan yang signifikan," harap Warsiman.

Kalaupun tidak terjadi, Warsiman mengklaim tidak khawatir dengan jumlah populasi sapi di Kabupaten Mukomuko. Dipastikan sudah ada penambahan populasi menjadi 25.496 ekor sapi, dari angka sebelumnya hanya 24.732 ekor sapi tahun 2019 lalu.

Namun jika sampai akhir tahun, target kelahiran sapi bisa tercapai total hingga 2.535 ekor. Maka jumlah populasi ternak sapi di Mukomuko akan bertambah hingga 27.263 ekor. "Perlu diketahui, jumlah populasi ternak sapi milik masyarakat dan sapi bantuan pemerintah per akhir tahun 2019 lalu ada 24.732 ekor. Terdiri dari 1.378 ekor sapi bantuan dari pemerintah, dan sebanyak 23.354 ekor sapi milik masyarakat," terang Warsiman. **(huc)**



DINI HARI: Satu warga meninggal dunia dengan hasil swab positif Covid-19, dimakamkan Selasa (22/12) malam.

Satu Lagi Pasien Covid Meninggal

Total 228 Kasus Positif

MUKOMUKO - Satu warga Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dikuburkan Selasa (22/12) dini hari. Pemakamannya dilakukan oleh petugas khusus dengan mengenakan alat pelindung diri lengkap. Jenazah dikuburkan bersamaan dengan peti yang sudah ditangani dengan protokol Covid-19.

"Pemakaman melibatkan sejumlah personel dari Polsek Teramang Jaya dan Satgas Penanganan Covid-19 desa setempat," kata Kapolres Mukomuko AKBP. Andy Arisandi, SH, S.IK, MH.

Warga yang meninggal dunia ini perempuan berusia 50 tahun. Ia diduga tertular Covid-19 dari pasien Covid-19 lainnya. "Ia kontak erat dengan pasien Covid-19," tambah Kapolres.

Warga tersebut pada 19 Desember 2020 mengalami sakit. Atas kondisinya itu, pada 20 Desember 2020, ia dibawa oleh pihak keluarga ke Puskesmas Bantal. Ia sempat dirawat inap sampai hari berikutnya, 21 Desember 2020. "Sekitar pukul 10.00 WIB, kondisi pasien makin membutuhkan penanganan medis lebih

lanjut. Sehingga dirujuk untuk dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko," terang Kapolres.

Namun siapa menyangka, baru dirawat beberapa jam, sekitar pukul 19.00 WIB, pasien dinyatakan dokter sudah meninggal dunia. Karena hasil swab sebelumnya pasien positif Covid-19, dengan begitu penanganan jenazahnya pun dilakukan dengan prosedur Covid-19. Warga ini dikuburkan di tempat pemakaman umum desa setempat secara protokol Covid-19. Aktivitas pemakaman pun berlangsung sekitar pukul 21.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 00.30 WIB.

"Pemakaman di tempat pemakaman umum itu setelah dipastikan masyarakat setempat tidak ada yang menolak jasadnya dimakamkan di TPU tersebut," pungkas Kapolres.

Kapolres mengimbau agar warga benar-benar menjaga diri. Sebab Covid-19 ini bukan perkara main-main. "Butuh kesadaran semua pihak. Bahwa Covid-19 ini benar-benar ada. Apalagi sampai hari ini, tren penambahan kasus masih terlihat," ingatnya.

228 Kasus Positif

Makin mencemaskan, kasus positif nyaris bertambah setiap hari di Mu-

komuko. Terbaru, 19 warga Mukomuko dinyatakan positif terpapar Covid-19. Dengan angka penambahan baru itu, menjadikan Mukomuko dengan total kasus sejak pandemi Covid-19 mencapai 228 kasus positif.

Tak hanya itu, data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Mukomuko, sudah 11 warga Kabupaten Mukomuko yang meninggal dunia dengan status positif terpapar Covid-19. "Sebanyak 11 orang meninggal dunia, 184 orang sembuh atau selesai isolasi, dan sebanyak 25 orang lainnya sedang melaksanakan isolasi mandiri. Termasuk pasien Covid yang baru keluar hasil swabnya," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM.

Khusus 11 kasus baru, tersebar di Kecamatan Air Dikit sebanyak 2 kasus, Kecamatan Air Manjuntjo sebanyak 3 kasus, Kecamatan Teramang Jaya sebanyak 1 kasus, Kecamatan Kota Mukomuko sebanyak 4 kasus, dan di Kecamatan XIV Koto sebanyak 1 kasus. Sedangkan 8 kasus baru lagi, baru diterima informasinya oleh Satgas kemarin (22/12).

"Sebagian besar kasus positif baru ini merupakan kontak erat dari pasien sebelumnya," kata Bustam. Ia tidak dapat memastikan, apakah

kasus terkonfirmasi Covid-19 di Kabupaten Mukomuko bakal terus bertambah atau akan berhenti.

Dijelaskannya, sepanjang perilaku masyarakat tidak ikut menjalankan protokol kesehatan, maka dapat dipastikan, kasus terkonfirmasi memiliki peluang besar bertambah. Bahkan bisa saja terjadi akan melledak jumlahnya. "Jika masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan dan menaati surat edaran yang dikeluarkan Bupati selaku Ketua Satgas, mudah-mudahan kasus dapat dihentikan," terang Bustam.

Jika pun ada yang terkonfirmasi positif, setelah penerapan ketat protokol kesehatan, Bustam yakin jumlahnya tidak akan banyak. Oleh sebab itu, sekarang ini kuncinya hanya ada pada kesadaran masyarakat. "Kalau masyarakat sadar dengan patuh terhadap protokol kesehatan, mudah-mudahan mata rantai penyebaran Covid dapat dihentikan dengan cepat," terang Bustam.

Ia mengingatkan masyarakat untuk dapat mematuhi surat edaran yang disampaikan Bupati. Untuk pengawasan penerapannya, surat tersebut sudah ditujukan ke seluruh Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan maupun tingkat desa. **(huc)**

Petugas Kebersihan Mogok Kerja

MUKOMUKO - Honor belum dibayar juga dialami puluhan petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mukomuko. Atas kondisi itu, 28 orang petugas kebersihan menggelar aksi mogok kerja terhitung kemarin (22/12).

Koordinator Petugas Kebersihan DLH Mukomuko, Haryadi mengatakan, 28 orang tenaga kebersihan itu selama ini sehari-hari bertugas menyapu lingkungan komplek perkantoran Pemkab Mukomuko, menyapu jalan protokol Kota Mukomuko, mengangkut sampah milik warga dan membuangnya ke tempat

pembuangan akhir (TPA) sampah. "Honor yang belum dibayarkan terhitung bulan November 2020," katanya.

Aksi mogok itu digelar setelah mereka kecewa karena sudah bekerja keras dari pagi sampai malam, namun haknya belum dibayarkan sampai kemarin. Aksi itu akan terus dilakukan hingga hak-hak mereka direalisasikan oleh Pemkab Mukomuko. "Selama hak kami belum dibayar, kami tidak akan bekerja. Masalah sampah, dan yang lainnya, terserah pemerintah. Mau dibuang atau tidak, bukan urusan kami lagi," kesalnya.

Menurutnya, sebelum melakukan aksi mogok kerja, selaku koordinator sudah berkoordinasi dengan pimpinan soal honor petugas kebersihan. Namun, kata dia, informasi yang ia dapatkan, untuk pembayaran honor puluhan petugas kebersihan peluangnya sangat kecil. Sebab anggaran yang ada sekarang sedang difokuskan untuk membayar utang dan yang lainnya.

"Karena didapat informasi demikian, ya dari pada kami bekerja sudah capek-capek tidak dapat upah, maka kami berhenti dulu hingga ada kejelasan. Kami berharap bisa secepat-

nya dibayarkan, tentunya sebelum akhir Desember ini," pintanya.

Terpisah, Kepala DLH Mukomuko, Suwanto mengakui penyebab adanya aksi itu akibat honor belum dibayarkan. Menurutnya, Jumat lalu ia sudah mendatangi Badan Keuangan Daerah Mukomuko untuk menanyakan honor bagi petugas kebersihan. Namun informasi yang ia dapatkan, bahwa saat ini kondisi keuangan Pemkab sedang sulit. "Kami juga prihatin dan sedih. Karena hak kawan-kawan pasukan kuning tidak bisa direalisasikan. Dari kami sendiri tidak ada solusi," ungkapny. **(huc)**



FUNGSIONAL: Sekretaris BKPSDM Mukomuko, Edy Suntono menyebutkan PNS yang berstatus staf mulai tahun depan diajukan menjadi fungsional.

500 PNS Diajukan Jadi Fungsional

MUKOMUKO - Sebanyak 500 orang pegawai negeri sipil (PNS) berstatus staf bakal jadi tenaga fungsional mulai tahun depan. Hal ini setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Mukomuko mengajukan draf pengusulan 500 staf menjadi tenaga fungsional.

"Pengajuan ini sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa tidak ada lagi yang namanya jabatan, hanya staf. Tapi ke depan yang ada itu fungsional," kata Sekretaris BKPSDM Mukomuko, Edy Suntono, SH.

Dengan menjadi tenaga fungsional, jelas Edy, akan menguntungkan PNS itu sendiri. Sebab akan mendapatkan pendapatan lebih dari biasanya. Selain itu, kariernya akan lebih baik. Sebab dapat mengurusi kenaikan pangkat tanpa harus berada di posisi tertentu. Kemudian bisa mengajukan kenaikan pangkat

lebih cepat dari biasanya.

"Selagi poin persyaratan terpenuhi, bisa naik pangkat lebih cepat. Terus ada tunjangan fungsional. Kalau staf biasanya pukul rata sekian tunjangannya. Kalau fungsional, tidak lagi seperti itu. Tunjangan diterimanya sesuai dengan pangkatnya," jelas Edy.

Menurut Edy, dengan PNS memiliki jabatan fungsional, maka kinerjanya akan lebih terukur. PNS juga akan dituntut lebih inovatif dan kreatif. Sehingga jabatan yang diembannya dapat terlaksana dengan baik. "Dengan jabatan fungsional, pegawai akan terukur kinerjanya. Bayarannya juga beda," kata Edy.

Ditargetkan surat keputusan (SK) untuk pengangkatan PNS staf menjadi tenaga fungsional akan tuntas awal tahun depan. Seluruhnya akan diangkat dengan SK Bupati Mukomuko. Setelah terbitnya SK, maka tidak

ada lagi PNS yang berstatus sebagai staf.

"Kalau sekarang, masih biasa, di bidang apa dan sebagai apa di dinas itu. Jawabnya, hanya staf. Ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Ketika ditanya sebagai apa di dinas itu, misal, jawabannya, sekarang jabatan saya sebagai Analis Kepegawaian," jelas Edy mencontohkan.

Meski sudah jadi tenaga fungsional, tambah Edy, bukan berarti PNS tersebut tidak bisa dimutasi atau dirotasi dari satu OPD ke OPD lain. Termasuk PNS juga berkesempatan untuk menjabat di jabatan eselon. "Semuanya tetap bisa. Yang jelas, salah satu keuntungannya itu, pangkat PNS bisa cepat naik bahkan lebih tinggi. Berbeda jika staf, kalau dia tidak naik di eselon, maka naik pangkatnya sulit ke yang lebih tinggi. Itu pun harus menunggu sampai empat tahun," beber Edy. **(huc)**

INFO HOTEL		
HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX / HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	Jl. Bakti Husada No. 88 Kel. Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	Jl. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858



RAPAT: Polres, Kodim dan Pemkab BU rakor terkait penanganan Covid-19.

Awas Lonjakan Kasus Covid-19

Saat Libur Nataru

ARGA MAKMUR - Selama libur Natal dan tahun baru (nataru) perlu diwaspadai terjadinya lonjakan kasus positif Covid-19. Terkait hal ini, Polres, Kodim dan Pemkab Bengkulu Utara (BU) melaksanakan rapat koordinasi. Hal ini juga bersamaan dengan Operasi Lilin Nala 2020.

Kapolres AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH mengatakan rapat bersama Dandim Letkol. Inf. Agung Pramudyo Saksiono, M.Si dan Kadis Kesehatan BU, Samsul Maarif, SKM, M.Kes tersebut sebagai langkah dalam mencegah penyebaran Covid-19. Apalagi bertepatan dengan waktu libur yang biasanya dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata.

TNI, Polri dan Pemkab BU akan melakukan pengawasan ketat pada warga yang melakukan aktivitas di luar rumah. Apalagi setelah ada edaran Bupati yang melarang keramaian dan menegakkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan (prokes). "Kita lakukan rakor mewaspadai titik-titik yang rawan keramaian dan bisa berpotensi penularan Covid-19," terangnya.

Sementara itu, Samsul Maarif menerangkan aktivitas keramaian masyarakat sejauh ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus Covid-19 di BU. Sehingga nantinya tim

gabungan akan melakukan patroli mencegah terjadinya keramaian.

"Sesuai dengan SE terbaru, kita juga akan bertindak lebih tegas dengan memberikan sanksi hingga pembubaran jika ada aktivitas yang berpotensi penyebaran Covid-19," tegasnya.

Bertambah 6 Kasus

Satgas Covid-19 BU mengumumkan penambahan enam kasus Covid-19 di BU, kemarin. Keenamnya tersebar di Kecamatan Arga Makmur, Tanjung Agung Palik dan Putri Hijau. Dari keenam kasus, hanya satu yang diketahui tertular dari kontak erat. Sedangkan sisanya belum diketahui sumber penularannya.

Saat ini total kasus Covid-19 di BU menjadi 216 kasus dengan kasus kematian 12 kasus dan kasus sembuh 143 kasus. Untuk warga yang terpapar Covid-19, mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan BU, Ujang Ismail, SKM, M.Kes menearangkan kemarin terdapat penambahan kasus sembuh sebanyak 12 kasus. Saat ini banyak penderita yang usianya di atas 55 tahun.

"Untuk yang diatas 55 tahun ini terjadi kendala karena penyembuhannya cukup sulit. Bahkan sudah ada yang lebih dari 3 minggu namun masih berstatus

positif" terangnya.

Dijelaskannya, warga yang mengalami gejala berat dan ringan langsung dilakukan perawatan di RSUD Arga Makmur. Ia menegaskan perawatan di RSUD Arga Makmur terkait Covid-19 diberikan secara gratis atau ditanggung pemerintah.

"Kita terus mensosialisasikan, meskipun tidak ada BPJS pelayanan kesehatan terkait Covid-19 tetap gratis dan memang lebih aman dari penyebaran. Namun kita tidak bisa memaksakan bagi yang berstatus tanpa gejala," terangnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan BU, Dr. Agus Haryanto, SE, MM menjelaskan saat ini siswa di BU tengah libur pasca pembagian rapor, selama dua minggu. Kembali mulai belajar pada awal Januari 2021, namun untuk BU belum akan melakukan belajar tatap muka. "Kondisi penyebaran Covid-19 di BU sudah sangat meluas. Apalagi ada penetapan zona merah untuk wilayah BU," terangnya.

Sekolah-sekolah di BU rencananya akan memperlakukan belajar jarak jauh. Hal ini mengantisipasi makin meluasnya kasus Covid-19 dan berpotensi menyerang pelajar serta guru jika memaksa dilakukan belajar tatap muka. "Akan sulit membatasi siswa untuk melaksanakan prokes. Meskipun di sekolah bisa kita antisipasi, namun aktivitas di luar sekolah sangat rentan," jelas Agus. (qia)

Target Angka Stunting di Bawah 5 Persen

ARGA MAKMUR - Memasuki tahun anggaran 2021, seluruh camat dikumpulkan di aula Dinas Kesehatan BU, kemarin. Hal ini dalam rangka aksi program penurunan angka stunting yang dilakukan di tiap kecamatan.

Setelah berhasil menurunkan angka stunting dari 25 persen menjadi 9,5 persen, Pemkab BU menargetkan tahun depan angka stunting bisa di bawah 5 persen. Bupati BU, Ir. H. Mian mengatakan camat dikumpulkan untuk mengetahui informasi dari masing-masing camat yang warganya ada tergolong stunting. Sekaligus menyerap aspirasi program dan langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

"Kita juga mengundang seluruh OPD terkait. Karena

permasalahan stunting ini bukan hanya di Dinas Kesehatan. Namun juga ada kaitannya dengan bantuan sosial, pangan dan lainnya," jelas Mian.

Salah satu yang ditargetkan pemerintah adalah memberikan bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu Pemkab BU juga menyiapkan bantuan program bedah rumah, jambanisasi dan drainase bagi kedeiaman warga yang kurang mampu. "Seluruh OPD kita arahkan programnya dan menyentuhkan langsung masyarakat. Jika mendapatkan bantuan sosial, bantuan pemukiman dan kesehatan, saya yakin akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," terangnya.

Mian meminta seluruh camat juga melakukan pengawasan terhadap jalannya

program-program tersebut. Sehingga bisa memastikan seluruh program dirasakan oleh masyarakat. "Saya ingin mulai awal tahun depan program sudah berjalan. Kita juga sudah mengetahui data masing-masing anak tergolong stunting," ujar Mian.

Selain menekan angka stunting, ia juga meminta OPD mencegah munculnya kasus baru stunting. Sehingga harus dilakukan pengecekan rutin saat ibu mengandung. Termasuk melakukan sosialisais menghindari terjadinya pasangan menikah dalam usia dini. "Karena banyak faktor munculnya stunting. Selain faktor ekonomi dan kesehatan, juga faktor usia menikah dini. Ini juga harus kita hindari," beber Mian. (qia)

Suami Gerebek Istri Bersama Pria Lain

ARGA MAKMUR - Warga Desa Karang Anyar II, Kecamatan Arga Makmur Selasa (22/12) dinihari sekitar pukul 00.30 WIB heboh. Pasalnya di salah satu hotel terjadi penggerebekan pasangan bukan muhrim yang berada di kamar hotel.

Penggerebekan tersebut dilakukan oleh As (32) warga Kecamatan Hulu Palik. As yang sudah sejak lama curiga dengan gelagat istrinya, Is (31) mencari Is yang malam itu tidak pulang ke rumah. Ia mengetahui sang istri menginap di hotel.

Saat melakukan penggerebekan bersama warga, benar saja Is tengah bersama pria lain di dalam hotel yaitu Sh (32). Penggerebekan tersebut dilakukan bersama keluarga As dan warga yang datang ke lokasi. Mereka kemudian diamankan di Mapolres BU untuk menghindari aksi main hakim sendiri.

Di hadapan polisi, Is mengaku tidak berbuat apa-apa di dalam kamar hotel tersebut. As juga akhirnya tidak membuat laporan ke polisi terkait dengan kasus ini dan memilih akan meny-

lesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Kapolres BU, AKBP. Anton Setyo Hartanto, S.IK, MH melalui Kasat Reskrim AKP. Jerry S Nainggolan, S.IK mengatakan polisi mengamankan ketiganya ke Mapolres BU menghindari adanya keributan dan kerumunan masyarakat. Setelah itu, ketiganya dilakukan mediasi di Mapolres. "Kita juga mengundang orang tua masing-masing. Mereka akhirnya memutuskan untuk tidak melapor dan akan menyelesaikan secara kekeluargaan," jelas Jerry. (qia)

Hanya 5 Hari

SELAMAT NATAL & TAHUN BARU 2021 23 - 27 DESEMBER 2020

Indomaret mudah dan hemat

Promosi tidak berlaku di toko Indomaret Point. S&K Berlaku

INDOMARET Beras Ramos Super 5kg sak Rp 58.900 Kartu Debit/Kartu Kredit BNI Rp 53.900*	BIMOLI Minyak Goreng 2L pch Rp 27.600 Rp 26.300 Jawa&Sumatera	BANGO Kecap Manis Refill 575/550ml pch Rp 23.500 Rp 19.000 Kartu Debit/Kartu Kredit BNI Rp 14.000*
INDOMARET Air Mineral 220ml 48 cup karton Rp 29.900 Flazz/Kartu Debit/Kartu Kredit BCA Rp 22.900*	SEDAP MIE Mie Instant Goreng 5x75g/Mie Instant Soto 5x75g pck Rp 2.000* DISKON Rp 1.500	ANGGUR Red Felipe whl Rp 75.000/kg
KOBE MIE Mie Goreng Boncabe Level 15 105g pck Beli 3 Gratis 1 Rp 2.000*	HEAD & SHOULDERS Shampoo Anti Dandruff Menthol Dingin/Clean&Balance/Bersih&Harum/Lemon Fresh 160ml btl Rp 17.900 Kartu Debit Rp 12.900*	ZEN Anti Bacterial Body Wash Shiso&Sandalwod/Shiso&Sea Salt 450ml pch Rp 27.000 Rp 18.900 Kartu Debit Rp 13.900*
PEPSODENT Pasta Gigi Fresh Cool Mint 190g tub Rp 42.900 Rp 8.900 Flazz/Kartu Debit/Kartu Kredit BCA Rp 6.900*	EMINA Bright Stuff Face Wash 50ml tub Rp 16.500 Rp 12.500 Flazz/Kartu Debit/Kartu Kredit BCA Rp 10.500*	VASELINE Body Lotion Healthy White UV Lightening/Aloe Fresh 200ml btl Rp 29.100 Rp 21.500 Kartu Debit Rp 16.500*
SO KLIN Softergent Powder 770/800g bag semua varian Rp 48.000 Rp 15.400 Kartu Debit/Kartu Kredit BNI Rp 10.400*	RINSO Detergent Powder+Molto Perfume Essence 1.kg bag Rp 44.200 Rp 36.200 Kartu Debit/Kartu Kredit BNI Rp 31.200*	BAYGON Insektisida Spray Anti Nyamuk Zen Garden/Flower Garden 600+75ml klg Rp 39.500 Rp 26.900
SO KLIN Pewangi Pakaian Refil Violet/Red/Pink/Blue 900ml pch Jawa&Bali Rp 43.100 Rp 8.500 Kartu Debit/Kartu Kredit BNI Rp 3.500*	VANISH Penghilang Noda Cair Pink/White 450/425ml pch Rp 26.800 Rp 19.800 Kartu Debit/Kartu Kredit BNI Rp 14.800*	SYARAT BELANJA: BNI Kartu Debit Rp 75.000/ Kartu Kredit Rp 160.000 BCA Kartu Debit/Flazz Rp 50.000 / Kartu Kredit Rp 100.000 MANDIRI SYARIAH Kartu Debit Rp 75.000 BRI Kartu Debit / BRIZZI Rp 75.000 Bank BNI/BCA/BRI/MANDIRI SYARIAH terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan *Tidak berlaku kelipatan

INDOMARET Pemesanan i-Delivery via CALL CENTER INDOMARET 1500-280

Hanya 5 Hari

SELAMAT NATAL & TAHUN BARU 2021 23 - 27 DESEMBER 2020

Indomaret mudah dan hemat

Promosi tidak berlaku di toko Indomaret Point. S&K Berlaku

FILMA Margarine Bernutrisi 200g pck Rp 4.800 Rp 3.800 Link Aja Rp 2.800*	TONG TJI Teh Celup Tanpa Amplop Jasmine 25's box Rp 9.400 Link Aja Rp 8.400*	ZEE Susu Bubuk Instant Swizz Chocolate/Vanilla Twizz 10x40g bag Rp 37.500 Rp 29.500 Link Aja Rp 28.500*
PALMIA ROYAL Butter Margarine 200g pck Rp 7.400 Rp 5.400 Link Aja Rp 4.400*	LUWAK White Koffie Original 10x20g pck Rp 13.800 Rp 9.900 Link Aja Rp 8.900*	KHONG GUAN Saltcheese Cracker 200g pck Rp 9.500 Rp 6.900 Link Aja Rp 5.900*
INDOMILK Kental Manis Putih 560/545g pch Rp 14.200 Rp 13.200 BRIZZI Kartu Debit/BANK BNI Rp 10.200*	Beli 1 pch FRISIAN FLAG Kental Manis Putih/ Cokelat 560g Gratis 1 btl FRISIAN FLAG Susu Cair Chocolate/ Choco Hazelnut 270ml	MISTER POTATO Snack Crips Original/ Barbeque/Sambal Matah 85g klg Rp 14.600 Rp 10.900 Kartu Debit Rp 5.900*
Beli 2 Gratis 1 INDOMARET Kuaci 80g pch Rp 2.000*	DUA KELINCI Kacang Garing 200g pck Beli 2 Gratis 1 Rp 2.000*	TARO Snack Net 65g pck semua varian Beli 2 Gratis 1 Rp 2.000*
INDOMARET Facial Tissue Non Perfumed/Saponusa 900g pck Rp 36.900 Rp 29.900 BRIZZI Kartu Debit/BANK BNI Rp 25.900*	INDOMARET Pencuci Piring Jeruk Nipis 800ml pch Rp 42.500 Rp 9.900 BRIZZI Kartu Debit/BANK BNI Rp 6.900*	SWEETY Bronze Pants Baby S36+2's/M34+2's/ L30+2's/XL+26's bag Size M,L,XL Rp 56.000 Rp 45.900 Flazz/Kartu Debit/Kartu Kredit BCA Rp 43.900*
INDOMARET Air Mineral dengan Oksigen Doraemon 330ml btl Rp 2.000*	INDOMARET Pencuci Piring Jeruk Nipis 800ml pch Rp 42.500 Rp 9.900 BRIZZI Kartu Debit/BANK BNI Rp 6.900*	MAMY POKO Pants Standar Slim M30's/L28's/XL23's pck HARGA SPESIAL Rp 47.500 Flazz/Kartu Debit/Kartu Kredit BCA Rp 45.500*
INDOMARET Air Mineral dengan Oksigen Doraemon 330ml btl Rp 2.000*	INDOMARET Pencuci Piring Jeruk Nipis 800ml pch Rp 42.500 Rp 9.900 BRIZZI Kartu Debit/BANK BNI Rp 6.900*	MITU BABY Tissue Ganti Popok Purple Playful Fresssia 50's pck Rp 22.900 Rp 14.900 Flazz/Kartu Debit/Kartu Kredit BCA Rp 12.900*
SYARAT BELANJA: BNI Kartu Debit Rp 75.000/ Kartu Kredit Rp 160.000 BCA Kartu Debit/Flazz Rp 50.000 / Kartu Kredit Rp 100.000 MANDIRI SYARIAH Kartu Debit Rp 75.000 BRI Kartu Debit / BRIZZI Rp 75.000 Bank BNI/BCA/BRI/MANDIRI SYARIAH terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan *Tidak berlaku kelipatan	INDOMARET Pemesanan i-Delivery via CALL CENTER INDOMARET 1500-280	

PAD Sektor Pajak Minim

Dewan Minta Pemkab Tegas, Beri Sanksi

SELUMA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluma meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma untuk memaksimalkan potensi pajak dan retibusi daerah untuk menopang pendapatan asli daerah (PAD). Pasalnya saat ini realisasi PAD tahun 2020 masih banyak yang tidak sesuai target. Salah satunya adalah PAD dari sektor pajak usaha walet.

Dari target PAD sebesar Rp 10 juta, hanya terealisasi sebesar Rp 3,8 juta saja. Untuk itu, pemerintah daerah harus semakin memacu kinerjanya agar target PAD bisa terpenuhi pada tahun 2021 nanti.

Ketua DPRD Seluma, Nofi Erian Andesca SSos mengatakan bahwa memang selama ini pencapaian PAD dari sektor pajak masih sangat rendah. Tentunya hal ini merupakan sebuah kebocoran PAD. Adapun beberapa PAD yang masih minim itu seperti di pajak usaha walet, pajak kuari, pajak air tanah dan lainnya.

Guna memaksimalkan pencapaian PAD, selain mencari peluang pendapatan dari sektor lainnya semestinya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih memaksimalkan upaya untuk menagih pajak yang terutang yang selama ini belum terselesaikan. Juga meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak agar ke depan realisasi PAD bisa atau bahkan melebihi target.

"Banyak PAD yang masih bocor, kita minta OPD terkait untuk memaksimalkannya, ini agar target PAD tercapai," sampai Nofi.

Dirinya juga mengharap kesadaran para objek pajak untuk membayar pajak sesuai dengan nominal yang telah ditentukan. Termasuk peran OPD terkait untuk memberikan sanksi tegas jika objek pajak ini membandel dengan tidak membayar pajak. Pemkab Seluma diminta untuk memaksimalkan pencapaian PAD karena hal ini berdampak besar bagi masyarakat banyak. Karena PAD itu bisa menambahkan APBD Seluma dan tentunya berimbas ke pembangunan baik infrastruktur maupun perekonomian.

"Jadi kita minta Pemkab juga untuk tegas, apabila ada objek pajak yang tidak taat ya disanksi, juga untuk mencari tahu dan memperbaiki kebocoran PAD selama ini," lanjutnya.

Sementara itu, Sebelumnya Kepala BPKD Seluma, Marah Halim SP MP MSi MAK melalui Kabit Pendapatan Darmawan Julianto mengatakan bahwa memang target PAD dari sektor pajak terutama usaha walet sebesar Rp 10 juta tidak tercapai. Bahkan dari 10 usaha walet yang terdaftar di BPKD Seluma, hanya 4 usaha yang menunaikan kewajibannya membayar pajak. Sedangkan 6 usaha walet lainnya tidak ada melakukan pembayaran pajak hingga saat ini.

Padahal, penarikan pajak dari sektor usaha walet ini sesuai dengan Perda Nomor 35 tahun 2005 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengesahan Sarang Burung Walet. Sulitnya realisasi target PAD ini disebabkan masih kurangnya kesadaran para pengusaha walet.

Pihaknya sendiri telah melakukan berbagai cara termasuk sudah melakukan upaya jemput bola. Yaitu dengan menagih langsung ke objek pajak yang telah terdata di BPKD Seluma ini. Namun tetap saja, upaya itu masih belum berubah manis.

"Berbagai upaya sudah kita lakukan, termasuk jemput bola, kita akan kembali memaksimalkan pada tahun 2021 nanti," pungkasnya. (cup)

Penetapan Pemenang Pilbup Seluma, Tunggu Putusan MK

SELUMA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma belum memutuskan pemenang hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 9 Desember lalu. Lantaran KPU Seluma masih menunggu Buku Registrasi Pelembagaan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (BRPK MK). Apabila nantinya BRPK MK telah keluar, maka KPU Seluma akan langsung melakukan penetapan pemenang Pilkada. Adapun diketahui bahwa pemenang Pilkada Seluma 2020 ialah pasangan calon Erwin Octavian-Gustianto.

Ketua KPU Seluma, Sarjan Effendi SE mengatakan bahwa saat ini seluruh tahapan Pilkada hampir selesai. Dimana tahapan selanjutnya ialah KPU mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati - Wakil Bupati Seluma terpilih. Namun, hal tersebut baru akan dilakukan jika tidak ada perselisihan atau gugatan dalam BRPK MK. BRPK MK itu sendiri akan keluar pada tanggal 15 Januari 2021 mendatang.

Sehingga jika dari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan tidak adanya gugatan yang masuk maka penetapan pemenang akan langsung dilakukan. Menurut peraturannya, penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih paling lama lima hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitakan permohonan yang teregistrasi dalam BRPK kepada KPU.

"Belum, kita masih menunggu BRPK MK terlebih dahulu, jika sudah keluar dan tidak adanya gugatan maka akan langsung ditetapkan," sampai Sarjan.

Sarjan menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menerima adanya informasi ataupun laporan dari paslon lainnya yang melakukan gugatan terkait hasil pemilu. Lantaran sampai saat ini secara resmi belum ada laporan ataupun informasi yang masuk ke KPU Seluma. Jika berdasarkan hasil rekapitulasi suara dalam Pleno Kabupaten yang digelar beberapa waktu lalu, paslon Nomer Urut 3 Erwin Oktavian SE - Drs Gustianto memenangkan Pilkada setelah perolehan suaranya unggul jauh sebanyak 55.638 atau jika dipersentasikan sebanyak 48 persen.

Disusul dengan Paslon Nomer Urut 2 Edison Simbolon S.Sos - Khairi Yulian S.Sos yang meraih suara sebanyak 41.122 atau sebanyak 35 persen. Sedangkan Paslon Nomer Urut 1 Drs Suparto M.SI - Novian Ail SE hanya meraih suara sebanyak 19.205 atau sebanyak 17 persen saja.

"Untuk pastinya kita belum tahu, kita tunggu dulu ya, yang jelas jika BRPK MK keluar maka akan langsung ditetapkan pemenangnya," pungkasnya. (cup)

Bupati Terbitkan SE, Larang Keramaian

SELUMA - Bupati Seluma akhirnya mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait pandemi Covid-19 pada Selasa (22/12) kemarin. Dalam surat edaran Nomor: 550/395/SE/B2.BPBD tersebut terkuat tentang penghentian kegiatan yang bersifat keramaian dan kerumunan.

Mengingat kondisi Kabupaten Seluma yang saat ini telah zona merah akibat Covid-19 serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam penerapan Protokol Kesehatan. Bahkan, kasus positif Covid-19 di Kabupaten Seluma kembali meningkat lagi sejak beberapa hari terakhir.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma, Arben Muktiar MSi melalui Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Pauzan Aroni SE mengatakan bahwa penerbitan SE itu setelah melalui beberapa proses dan kajian. Dimana draftnya telah

diusulkan sejak beberapa hari lalu dan akhirnya telah ditandatangani oleh Bupati Seluma. Sehingga dengan begitu, maka SE tersebut sudah mulai berlaku.

"Sudah mulai berlaku, karena sudah ditandatangani Bupati, sejak hari ini mulai berlaku," ujarnya.

Dalam surat edaran itu, ada 9 poin yang dimasukkan ke dalamnya. Yakni semuanya bersifat tentang

9 POIN LARANGAN KERAMAIAAN

1. Tidak mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian/kerumunan seperti resepsi pernikahan, aqiqah, sunatan, syukuran, tabligh akbar, tabligh musibah dan perayaan Natal.
2. Tidak mengadakan kegiatan perayaan menyambut Tahun Baru 2021.
3. Tidak mengadakan kegiatan pasar malam dan konser musik.
4. Rumah-rumah ibadah, pemilik atau pengelola tempat-tempat hiburan, pusat perbelanjaan restoran, kafe, rumah makan agar selalu mematuhi protokol kesehatan seperti setiap pengunjung wajib memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan/sabun, mengatur jarak tempat duduk dan membatasi pengunjung maksimal 50% dan kapasitas ruangan yang tersedia.
5. Khusus restoran dan kafe jam buka dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas tetap melaksanakan tugas kedinasan di kantor. Sedangkan pejabat fungsional dan pelaksana dapat tugas kedinasan di rumah (Work from Home). Kecuali ASN yang bertugas melaksanakan pelayanan publik seperti di RSUD Tais, Puskesmas, Pelayanan Dukcapil, Pemadam Kebakaran serta mengimbau kepada BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta untuk menyesuaikan.
7. Bagi masyarakat (rentan dan berisiko tinggi terhadap Covid-19 seperti ibu hamil menyusui dan warga yang berusia lanjut (Lansia) dianjurkan agar menghindari keramaian, keluar rumah dan lebih baik berdiam diri di rumah (Stay at Home).
8. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bupati Seluma Nomor 420/291/B.2 BPBD/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Sosial Dalam Pola Hidup Baru di lingkungan Pemkab Seluma tidak berlaku lagi.
9. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai pemberitahuan berikutnya bilamana Pandemi Covid-19 sudah dinyatakan terkendali.

larangan kegiatan keramaian. Kebijakan dalam surat edaran itu diharapkan menekan potensi penularan Covid-19 pada momen natal dan pergantian tahun. Adapun untuk sosialisasi ke masyarakat, pihaknya telah mulai melakukannya.

Yakni dengan bekerja sama setiap instansi terkait mulai dari Dinas PMD Seluma, Camat, Dinas Kominfo, Polres Seluma dan lainnya. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui bahwa telah terbit SE tersebut dan mulai menerapkannya.

"Jadi harapan kita dengan adanya SE ini bisa mengantisipasi adanya kegiatan yang bersifat mengundang keramaian, karena penghentian pandemi virus corona merupakan tugas bersama," pungkasnya. (cup)



SWAB: Para nakes saat menjalani swab tes antigen di RSUD Tais pada Senin lalu.

Tiga Nakes Reaktif, Diswab di Labkesda

SELUMA - Pasca ditemukannya satu tenaga kesehatan (Nakes) yang positif terpapar Covid-19 di Puskesmas Masbambang, tim gugus tugas Covid-19 Seluma langsung melakukan upaya tracking.

Yaitu dengan melakukan swab tes antigen untuk mengetahui terpapar atau tidak virus corona. Setidaknya ada 73 nakes yang menjalani swab tes tersebut di RSUD Tais pada Senin (21/12) pagi. Akhirnya, hasil swab

tes antigen itu telah keluar dan ditemukan adanya tiga Nakes yang dinyatakan reaktif.

Hal ini membuat ketiga nakes tersebut harus kembali menjalani swab tes lanjutan yaitu ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Bengkulu. Swab tes itu tak hanya dilakukan para Nakes yang bertugas di Puskesmas Masbambang saja. Melainkan para Nakes yang bertugas di Puskesmas Ilir

Talo dan beberapa Nakes yang bertugas di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seluma juga ikut melakukannya.

"Ada sebanyak 73 orang yang menjalani swab test antigen ini, hasilnya ada tiga nakes yang reaktif sehingga perlu diswab lanjutan," sampai Direktur RSUD Tais, dr Wiwin Herwini melalui Kabit Pelayanan, Sulaiman SKM.

Dimana swab lanjutan itu baru selesai dilakukan dua nakes pada Selasa (22/12)

kemarin. Sedangkan satu nakes lainnya belum menjalani swab lanjutan. Satu nakes tersebut berhalangan hadir sehingga direncanakan akan menjalani swab pada Rabu (23/12) ini. Adapun swab lanjutan itu seperti swab pada umumnya dan sampelnya akan diperiksa terlebih dahulu di Labkesda Bengkulu.

"Ya, baru dua yang sudah menjalani swab lanjutan, satu lagi dijadwalkan pada Rabu ini," lanjutnya.

Terkait dengan ke tiga Nakes yang dinyatakan Reaktif, semuanya diharuskan menjalani isolasi mandiri. Isolasi itu dilakukan sembari menunggu hasil swab keluar. Sedangkan untuk yang hasilnya non-reaktif sudah bisa kembali bekerja dan beraktifitas seperti biasanya.

"Yang reaktif kita wajibkan untuk menjalani isolasi mandiri, sampai hasil swab lanjutannya keluar," tegasnya. (cup)

ADD Dua Desa Segera Disalurkan

SELUMA - Pemerintah desa (Pemdes) di dua desa yang ada di Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) akhirnya bisa bernafas lega. Keduanya Desa Ujung Padang dan Desa Padang Kelapo. Menjelang penutupan tahun ini, penyaluran anggaran dana desa (ADD) sejak bulan Januari lalu akan direalisasikan.

Hal ini setelah Pemkab Seluma melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Seluma mengupayakan langkah terbaik. Tentunya dengan tetap mengikuti kebijakan dan peraturan yang berlaku.

Plt Kepala Dinas PMD Seluma, Drs Agus Jun Fadhillah mengatakan bahwa memang pihaknya mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Memang, ADD di dua desa tersebut tidak bisa dikeluarkan rekomendasi pencairannya karena pengajuan berkas tidak sesuai persyaratan. Mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun maka Pemkab Seluma memberikan keringanan.

Yaitu akan mencairkan ADD di dua desa tersebut sejak bulan Januari lalu. Sehingga berkas pengajuannya ada tiga dimulai dari tahap pertama hingga ketiga. Pihaknya juga memberikan perpanjangan waktu untuk kades setempat melengkapi berkas pengajuan pencairannya sebelum tanggal 31 Desember nanti. Hal ini dilakukan agar ADDnya bisa terserap dan terealisasi sebelum pergantian tahun.

"Segera, diupayakan segera disalurkan, kita saat ini tengah menyusun teknisnya, sembari menunggu berkas pengajuan dari dua desa itu masuk," ujar Agus.

Agus menambahkan, pihak desa diminta untuk membuat berkas pengajuan tanpa menganggarkan pembayaran gaji untuk perangkat desa. Sehingga pembayaran gaji itu sendiri hanya untuk kepala desa, BPD, pengurus masjid dan lainnya yang diluar jabatan perangkat desa. Apabila masih ingin membayarkan gaji perangkat desa maka diminta untuk mengikuti peraturan

yang ada. Maka dari itu, dalam berkas pengajuan pencairan ADD hanya berisikan operasional dan lainnya.

"Ya seperti itu, jadi pencairannya nanti langsung tiga tahapan, tidak ada dibagi-bagi tahapannya," lanjutnya.

Sementara itu, batas akhir pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sudah selesai pada tanggal 15 Desember lalu. Namun masih terdapat beberapa desa yang belum melakukan pencairan. Alasannya karena berkas pengajuan pencairan ADD masih belum lengkap. Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Seluma masih memberikan waktu tambahan untuk pihak desa melengkapi berkasnya. Jika telah dilengkapi, Dinas PMD Seluma akan langsung mengeluarkan rekomendasi pencairan.

"Iya sudah tutup batas waktu seharusnya, tapi mereka itu tinggal melengkapi dan membenarkan saja karena ada kekurangan atau kesalahan data, jadi kita masih tunggu," pungkasnya. (cup)

Pasien Covid di Seluma 92 Orang

SELUMA - Kasus positif Covid-19 di Kabupaten Seluma masih belum berakhir. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Seluma mencatat, jumlah total positif terkonfirmasi hingga saat ini sudah mencapai 92 kasus. Jumlah itu terdiri dari 18 kasus aktif, 67 kasus sembuh, serta 9 kasus meninggal dunia.

Tentunya hal ini masih menjadi "PR" besar semua pihak untuk menekan penyebaran virus corona di Kabupaten Seluma. Lantaran kasus positif masih terus ditemukan sehingga belum bisa kembali menjadi zona hijau.

Kepala Dinas Kesehatan Rudi Syawaludin, SSos melalui Kabit Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ahmad Tavip SIP membenarkan hal tersebut. Dimana memang sejauh ini tercatat sudah ada 92 kasus positif Covid-19 yang ditemukan di Kabupaten Seluma. Dari jumlah tersebut ada 18 kasus yang masih aktif dan pasiennya tengah menjalani isolasi mandiri di rumahannya. Sedangkan juga ada kasus meninggal dunia sebanyak 7 kasus dan 2 kasus meninggal dunia dengan probable.

Melihat angka ini, Dinkes Seluma terus mengupayakan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sekaligus juga terus merutinkan pemberian sosialisasi protokol kesehatan. "Hingga saat ini ada total 92 kasus di Kabupaten Seluma, diantaranya 18 kasus masih aktif," ujar Tavip.

Dirinya menambahkan, untuk upaya pemutusan mata rantai juga terus dilakukan. Yakni dengan tracking kontak pasien dan melakukan swab tes massal. Hal ini dilakukan untuk menghindari ditemukannya cluster baru penyebaran virus corona. Yang mana, dari semua kasus aktif itu belum ditemukan adanya cluster terbaru. Rata-rata semua kasus positif itu tunggal dan tersebar di beberapa kecamatan.

"Untuk upaya tracking terus kita lakukan, apabila ada kasus baru langsung kita tracking dan swab," sampainya.

Sementara itu, pihaknya juga mengajak semua lapisan masyarakat agar tidak kendor dalam disiplin protokol kesehatan. Seperti menggunakan masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dan meningkatkan imunitas tubuhnya. Hal ini merupakan langkah-langkah dalam upaya menghentikan penyebaran sehingga pandemi bisa segera berakhir.

"Kita harap Seluma bisa kembali menjadi zona hijau, ini bisa terjadi apabila kita disiplin protokol kesehatan," pungkasnya. (cup)

DI JUAL RUKO 2 LANTAI

Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Komplek Bengkulu (pas di depan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RIM padang dan sebelah kanan warung Bakso

LOKASI STRATEGIS

Lokasi: Jl. M.T. Haryono Penggantungan, Kec. Ratu Samban, Ruko 2 tingkat di dekat simpang Senting, Kota Bengkulu. UK. 3,7m x 14m Harga nego

Minat Hub. April 0813 7347 7299

JUAL RUKO

Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Komplek Bengkulu (pas di depan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RIM padang dan sebelah kanan warung Bakso

fasilitas : 1 kamar, kamar mandi, ruang masak, sumur bor & tedmon, cocok untuk usaha apa saja

Harga 350 juta nego

Minat hubungi : 082179363606 / 082375706151

JUAL TANAH/RUMAH

Luas Tanah 634 M2, SHM, Rumah Fas :

3 Km Tidur, 1 R. Tamu, 1 R. Tv/Keluarga, 2 Teras Muka dan Belakang, 1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak Tanah Sudah Dipagar Keliling, Pagar Besi dan Tembok

Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/Rt. 17 No. 34 Kel. Padang Harapan Bkl

Hubungi : 0878 9496 1917 0819 1931 8688 (Berminat silahkan cek lokasi)



MIRAS: Sejumlah minuman keras diamankan Polsek Tanjung Kemuning dari berbagai warung.

Giliran Polsek Tanjung Kemuning Sita Miras

KOTA BINTUHAN - Maraknya penjualan minuman keras (miras) jelang malam pergantian tahun di wilayah hukum Polres Kaur, menjadi perhatian serius Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH. Dari berbagai operasi pekat nala tahun 2020 yang dilakukan polsek-polsek, berhasil mengamankan berbagai jenis miras dari sejumlah warung remang-remang dan kafe.

Namun, operasi yang digelar Polres dan polsek-polsek mudah diketahui oleh masyarakat atau pemilik warung. Sehingga hasilnya masih belum maksimal, karena jumlah miras yang diamankan masih belum terlalu banyak. Untuk itu hingga malam tahun baru, jajaran Polres Kaur terus melakukan operasi pekat nala di sejumlah wilayah di kabupaten ini.

Kemarin (22/12), giliran Polsek Tanjung Kemuning yang menggelar razia miras dan berhasil mengamankan 19 botol miras merk Mansion. Miras diamankan dari sejumlah warung manisan di wilayah Sulauwangi, Kecamatan Tanjung Kemuning. Sebelumnya, Polres Kaur juga berhasil mengamankan miras di wilayah tersebut saat operasi pekat nala 2020.

"Kita masih akan terus menggelar razia hingga tahun baru. Kita imbau untuk tidak ada penjualan miras apalagi mabuk-mabukan saat malam tahun baru di Tanjung Kemuning dan sekitarnya," kata Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK, MH melalui Kapolsek Tanjung Kemuning, Iptu Rabnus Supandri, kemarin.

Kapolsek juga mengimbau para remaja untuk tidak menggelar aksi kumpul-kumpul di Jembatan Padang Guci. Apalagi saat ini arus lalu lintas terus meningkat jelang Natal dan tahun baru. Ia juga meminta masyarakat dan pengguna jalan untuk melapor jika ada aksi balap liar pada malam dan sore hari di Jembatan Padang Guci. "Kita mengimbau agar ABG atau anak-anak muda untuk mengurangi kegiatan nongkrong di jembatan. Saat ini arus lalu lintas cukup padat," ujarnya.(cik)

Serapan DD/ADD Capai 100 Persen

KOTA BINTUHAN - Berbeda dengan tahun sebelumnya, penyerapan dana alokasi desa (ADD) dari APBD dan dana desa (DD) dari APBN, tuntas 100 persen hingga akhir Desember 2020. Tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Kaur tidak pernah DD terserap 100 persen. Ada satu atau dua desa yang bermasalah, lambat dan sebagainya sehingga penyerapan tidak sampai target.

Namun untuk tahun ini, dua minggu sebelum tutup buku, semua desa telah mengajukan pencairan DD/ADD. Kepastian ini disampaikan Sekretaris BKD Kaur, Yanuar Aris Pribadi, kemarin. Ia berharap akhir tahun 2020 ini semua kegiatan fisik dan non fisik DD tahun 2020 di 192 desa juga tuntas dengan baik. Apalagi tahun ini banyak kegiatan non fisik, seperti untuk DD ada bantuan warga miskin yang terdampak Covid-19.

"Alhamdulillah semua DD/ADD berdasarkan data yang masuk ke kita itu sudah terserap 100 persen. Ini harus menjadi contoh untuk tahun-tahun ke depan, sehingga penggunaan DD bisa terus bergulir untuk pembangunan masyarakat desa itu sendiri. Kita juga berharap akhir tahun ini kegiatan DD tahun 2020 juga tuntas di setiap desa. Apalagi masih ada waktu tersisa untuk menyelesaikan semua kegiatan DD khususnya untuk pembangunan fisik," jelas Yanuar.

Tahun ini, Kaur mendapatkan alokasi DD dari pemerintah pusat sebesar Rp 147 miliar lebih. Kemudian ada tambahan 10 persen dari ADD dari APBD Kaur tahun 2020. Sedangkan tahun 2021, Kabupaten Kaur juga kembali mendapatkan alokasi DD dari APBN sebesar Rp 147 miliar lebih.

Kades baru di 115 desa hasil pilkades bulan Februari 2021 nanti, dipastikan akan menikmati alokasi DD/ADD tersebut. Karena biasanya pencairan tahap awal DD/ADD baru dimulai bulan April.(cik)



FOGGING: Petugas melaksanakan fogging sebagai antisipasi perkembangan nyamuk DBD.

Selain Covid-19, Juga Waspada DBD

KOTA BINTUHAN - Warga Kabupaten Kaur tidak hanya harus waspada terhadap meningkatnya kasus positif Covid-19 yang saat ini sudah mencapai 74 kasus. Namun tidak kalah penting dengan kasus Covid-19, saat musim hujan saat ini penyakit DBD juga harus diwaspadai. Penderita DBD yang lambat ditangani juga dapat menyebabkan kematian.

Dinas Kesehatan Kaur bersama perangkat Desa Air Dingin kembali melakukan fogging kemarin (22/12). Fogging dilakukan karena sudah dua orang di dalam satu rumah yang merupakan warga

Air Dingin diketahui menderita DBD. "Sudah ada dua warga yang positif DBD, bahkan satu orang masih dirawat. Untuk itu kita meminta dilakukan fogging dan kita imbau warga lainnya waspada. Selalu menjaga lingkungannya apalagi saat musim hujan seperti saat ini. Jika lingkungan kotor dan banyak tergenang air, bisa menjadi sarang dan berkembangnya nyamuk aedes aegypti penyebab DBD," kata Sekdes Air Dingin, M. Saleh.

Sementara itu, Kabid P2KP Dinas Kesehatan Kaur, Juli Haryanto membenarkan saat ini kasus DBD cenderung meningkat apalagi saat

musim hujan saat ini. Berdasarkan tahun sebelumnya, peningkatan kasus DBD biasanya terjadi pada akhir tahun dan awal tahun karena musim hujan. Untuk itu warga Kaur diminta untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari DBD.

Apalagi kasus DBD di Kabupaten Kaur cukup tinggi sehingga harus menjadi perhatian. Hingga saat ini kasus DBD telah mencapai 65 kasus, jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada bulan Desember hingga awal tahun 2021.

Berdasarkan data yang dimiliki Dinkes Kaur, kasus DBD di Kaur pada tahun 2020 masih cukup tinggi. Bu-

lan Januari 2020 ada 14 kasus DBD, Februari 13 kasus, Maret 13 kasus, April 4 kasus, Juni 8 kasus, Juli 3 kasus, Agustus 4 kasus, September 1 kasus, Oktober 2 kasus, November 3 kasus DBD.

"Kasus DBD paling banyak ditemukan di wilayah padat penduduk, seperti Kecamatan Kaur Selatan, Kalam Tengah, Pagulu dan Tanjung Kemuning. Kondisi hujan seperti saat ini bisa terus sampai awal Januari 2021. Untuk itu warga diminta tetap waspada. Bila ada yang positif laporkan segera, karena saat ini stok untuk fogging masing cukup hingga akhir tahun," jelas Juli.(cik)

Dirikan Pos di Laguna dan Linau

KOTA BINTUHAN - Untuk pengamanan Natal dan tahun baru, Polres Kaur telah mendirikan dua pos pengamanan (pospam) yakni pospam di kawasan Pantai Laguna, Kecamatan Nasal dan posyan Desa Linau, Kecamatan Maje. Hal ini disampaikan Kapolres Kaur AKBP Dwi Agung Setyono, S.IK melalui Kabag Ops AKP Fahrul Ikwon.

Menurutnya, posyan di Linau untuk memantau arus lalu lintas, baik dari arah Lampung ke Bengkulu dan sebaliknya pada libur pan-



SIAP: Pospam Laguna siap memberikan pelayanan kepada pengunjung Pantai Laguna saat malam tahun baru.

jang akhir tahun 2020. Pos tersebut juga untuk memantau kegiatan wisatawan yang berkunjung ke Linau. Sedangkan pospam yang berada di Laguna untuk memantau pengunjung di objek wisata Laguna yang selalu ramai pada malam pergantian tahun.

Personel Polres Kaur juga mulai ditempatkan di setiap pos untuk pengamanan Natal dan tahun baru. Dengan harapan agar umat Kristen yang merayakan Natal bisa beribadah dengan aman. "Untuk pengamanan objek wisata kita sudah dirikan dua pos yaitu posyan di Linau dan pospam di Laguna dan saat ini sudah mulai aktif. Untuk pengamanan malam Natal saat puncak Natal kita siapkan personel pengamanan di setiap gereja-gereja. Personel pengamanan tidak hanya dari Polres, namun juga dari

Polsek-Polsek," jelas Fahrul. Sementara itu, pantauan di Laguna saat ini pengunjung masih sepi, namun anggota Polres dan Polsek Nasal sudah standby di Pospam Laguna. Polisi terus menggelar patroli keliling di Laguna dan sekitarnya mengingatkan pengunjung di Laguna agar tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di tempat wisata.

"Untuk saat ini kondisi masih sepi, namun karena libur sekolah pengunjung lokal masih tetap banyak yang datang ke Laguna. Namun karena ini di tengah wabah Covid-19, kita terus mengingatkan pengunjung untuk tetap memakai masker. Juga mematuhi protokol kesehatan saat berada di Laguna dan sekitarnya," jelas Kapolsek Nasal, Iptu Danang Purwanto.(cik)

Satu Mantan dan Satu Kades Terseret Korupsi

Masih Proses Sidang di Pengadilan Tipikor

KOTA BINTUHAN - Kendati wabah Covid-19, namun pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Polres Kaur dan Kejari Kaur tetap berjalan. Berdasarkan data, tahun 2020 ini ada dua kasus korupsi yang naik hingga ke persidangan yang melibatkan mantan kades dan kades aktif.

Kasus pertama yakni dugaan korupsi dana desa (DD) yang melibatkan mantan Kades Gramat, Kecamatan Kinal, Edi Sarsan. Ia ditahan oleh Polres Kaur. Edi terbelit kasus penyelewengan DD tahun 2018. Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kaur dan BPKP, kerugian negara sebesar Rp 319,9 juta. Edi sempat diamankan karena tidak mengembalikan kerugian negara hingga 60 hari setelah hasil audit keluar. Saat ini Edi Sarsan telah menjalani proses sidang di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Kasus kedua, dilakukan Kades Babat, Kecamatan Tetap, Sirajudin. Saat ini, ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Kaur. Kades Babat bukan terkait korupsi DD, namun terbelit kasus dugaan korupsi pembangunan embung bantuan dari KPDT tahun 2019 den-

gan kerugian negara sebesar Rp 148,7 juta dari dana pembangunan embung Rp 320 juta. Tersangka telah dilimpahkan Kejari Kaur ke Pengadilan Tipikor Bengkulu untuk proses sidang.

"Untuk kasus DD Gramat saat ini masih sidang di Pengadilan Tipikor dan masih pemeriksaan saksi-saksi. Sementara kasus pembangunan embung dengan terdakwa Kades Babat, hari ini (kemarin, red) sidang perdana," kata Kajari Kaur Nurhadi Puspandoyo, SH, MH melalui Kasi Intelijen A Gufroni, SH, MH, kemarin.

Terpisah Kasi Pidsus Kejari Kaur, Alman Noveri, SH, MH membenarkan proses sidang perdana terdakwa pembangunan embung dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Sirajudin di Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Untuk kasus pembangunan embung tahun 2019 ini, Kejari Kaur baru menetapkan satu tersangka. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya, jika nantinya fakta di persidangan terbukti ada keterlibatan pihak lainnya. Apalagi sebelum menetapkan Kades Babat sebagai tersangka, penyidik Pidsus Kejari Kaur sempat menggeledah beberapa ruangan di Dinas PMD Kabupaten Kaur.(cik)

PERUMAHAN CLUSTER TENGAH PADANG RESIDENCE
Lokasi: Jl. Iskandar, 50m dari Masjid Jamik Depan SMPN 3

PERUMAHAN BATANG HARI PERMAI II
Lokasi: Jl. Batang Hari Kel. Nusa Indah

PERUMAHAN MINIMALIS AHSANI RESIDENCE
Lokasi: Jl. Dempo 4 Kebun Tebeng Kota Bengkulu

Miliki Segera Perumahan Subsidi :

BENTIRING PERMAI III
Lokasi: Jl. Darma Wanita Kel. Bentiring

PEMATANG PERMAI
Lokasi: Jl. Perintis Kel. Pematang Gubernur

SURABAYA PERMAI V
Lokasi: Jl. Nakau - Air Sebaku Kel. Surabaya

KPR Bisa Melalui **Bank @ BTN**

Hubungi: PT. AHSANI KARYA
Jl. Fatmawati No. 16 A Penurunan (Depan SD 2) Kota Bengkulu
Telp. 0736-24996, HP. 085279648787, 082175712286, 082371305405



BB: Barang bukti lakalantas yang masih diamankan di Mapolres BS.

10 Orang Meninggal Dunia Kasus Lakalantas 2020

KOTA MANNA - Sepanjang tahun 2020 ini Sat Lantas Polres BS mencatat 10 orang meninggal dunia (MD) akibat lakalantas di jalan raya. Dari total kasus MD itu, terbanyak terjadi di ruas jalan lintas Kecamatan Bunga Mas.

Dari data Unit Laka Sat Lantas Polres BS lebih kurang 24 kasus lakalantas yang ditangani sepanjang Januari hingga pertengahan Desember 2020. Jumlah ini masih terbilang tinggi. Apalagi jumlah korban MD mencapai 10 orang.

Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Lantas Iptu. Eka Ardiansyah disampaikan Kanit Laka Aipda. Turman Aidi mengakui kasus laka di BS masih cukup tinggi. Dari data 10 MD dari 24 kasus tersebut, kerugian material hingga Rp 150 juta. Data tersebut yang hanya ditangani pihaknya saja sepanjang tahun 2020.

Diungkapkan Turman, lakalantas paling banyak terjadi di jalan lintas Bunga Mas. Ia menyebutkan ruas jalan tersebut memang sangat bagus dan panjang, sehingga pengendara yang melintas terlena. Ditambah lagi banyak kendaraan besar yang melintas dan mobil-mobil pengangkut material batu dari sungai Kecamatan Bunga Mas.

Untuk mengantisipasi terjadinya laka, Sat Lantas berulang kali melakukan imbauan pada warga BS, baik melalui penyampaian langsung ke warga dan melalui rumah ibadah. Namun demikian, Turman mengaku laka tidak bisa dicegah begitu saja. Banyak faktor yang menyebabkan laka terjadi, mulai dari pengendara mengantuk sampai yang mabuk. Namun rata-rata lakalantas di Bunga Mas karena pengendara memacu kendaraan terlalu kencang. "Memang untuk kasus paling banyak itu di Bunga Mas, mulai dari tabrakan sampai laka tunggal," jelasnya.

Sat Lantas Polres BS mengimbau pada semua pengendara untuk lebih waspada. Apalagi beberapa hari lagi jelang tahun baru banyak pengendara yang melintas. Khusus untuk pengendara motor selalu pakai helm dan tidak ugal-ugalan. (tek)



ISOLASI: Pemkab Bengkulu Selatan menyiapkan Asrama Akbid sebagai tempat isolasi khusus pasien Covid-19 jika lonjakan pasien meningkat.

Siagakan Asrama Akbid untuk Pasien Covid

KOTA MANNA - Pemkab Bengkulu Selatan (BS) kembali menyiagakan Asrama Akbid yang berada di kawasan Padang Panjang, Kota Manna sebagai ruang isolasi khusus untuk pasien Covid-19 di Kabupaten BS. Langkah ini diambil karena kamar isolasi RSUD Hasanudin Damrah Manna yang terbatas.

Saat ini data pasien yang terkonfirmasi sudah sebanyak 26 pasien. Sehingga dengan adanya asrama ini, Pemkab BS tidak khawatir jika ruang isolasi khusus di RSUD HD sudah penuh. Dikatakan Bupati BS Gusnan Mulyadi, Dinas Kesehatan harus segera mempersiapkan segala ke-

butuhan di asrama tersebut, jika nantinya ada tambahan kasus Covid-19. Sebab saat ini perkembangan kasus Covid-19 belum mengalami penurunan.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten BS Siswanto, S.Sos, M.Si menjelaskan segala kebutuhan dan fasilitas pasien sudah disiagakan oleh Dinas Kesehatan. Termasuk alkes, berupa tempat tidur pasien dan petugas medis yang akan melakukan perawatan medis. "Semua sarana siap di Rusunawa Asrama Akbid, tidak ada kendala," jelas Siswanto.

Untuk diketahui Asrama Akbid Manna memiliki 48 ka-

mar tidur yang telah dilengkapi dengan sarana kebutuhan pasien yang terpapar virus corona. Oleh sebab itu Pemkab BS menyampaikan Rusunawa selalu siap untuk digunakan apabila sewaktu-waktu pasien membludak.

Wabup Isolasi Mandiri

Kondisi kesehatan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (B) Rifa'i Tajuddin pasca dinyatakan positif Covid-19 terus membaik. Terbaru Wabup telah meninggalkan rumah dinas untuk menjalani isolasi mandiri di kediaman keluarganya di Kota Bengkulu.

Kepastian isolasi di luar Kabupaten BS ini disampai-

kan Kepala Dinas Kesehatan BS, Siswanto. Dijelaskannya, kondisi Wabup masih dalam pengawasan, baik keluarga maupun tim medis. Selama menjalani isolasi mandiri di kediaman keluarganya di Kota Bengkulu, Wabup juga intens melakukan komunikasi melalui seluler.

"Ya pengawasan terus dilakukan, Wabup memilih ke Kota Bengkulu untuk isolasi mandiri. Kondisinya juga terus membaik," jelas Siswanto.

Sebelumnya Wabup dinyatakan positif Covid-19 pada Jumat (18/12) malam. Saat itu ia baru pulang dari Jakarta dalam rangka urusan kedinasan.

Terpisah, Bupati BS, Gusnan Mulyadi mendukung penuh untuk kesembuhan Wabup. Bupati meminta doa pada masyarakat BS agar Covid-19 cepat hilang dan masyarakat dapat beraktivitas normal.

Bupati mengajak warga BS selalu mematuhi protokol kesehatan. Baginya, keselamatan masyarakat nomor satu, oleh sebab itu segala aktivitas yang mengandung orang banyak masih dilarang saat ini. "Doakan semua orang yang terpapar dapat melaluinya dengan sabar, dan kita semua harus mendukung langkah pemerintah," ajak Gusnan. (tek)



TUTUP: Pelayanan Samsat tutup selama empat hari.

Besok, Layanan Samsat Tutup

KOTA MANNA - UPTD-PPD Samsat Bengkulu Selatan (BS) akan menghentikan layanan pembayaran pajak kendaraan Kamis (24/12). Layanan akan kembali dibuka tanggal 28 Desember. Penutupan ini jelang berakhirnya pelayanan Samsat selama tahun 2020.

Bila masyarakat BS ingin membayar pajak kendaraan Kamis besok, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Kepala UPTD-PPD Samsat BS, Sirwan Mayudi, S.Pd mengatakan, menjelang tahun baru dan berakhirnya pelayanan Samsat selama tahun 2020, Samsat tutup selama empat hari. Dan akan dibuka tiga hari sebelum

memasuki tahun baru 2021. Dia meminta masyarakat BS menunda proses pembayaran pajak di empat hari tersebut. Namun demikian apabila kendaraan jatuh tempo dalam tanggal libur tersebut, pihaknya akan memberikan keringanan dan boleh dibayarkan setelah tanggal masuk yakni 28 Desember dan tidak dikenakan denda apapun.

Sementara itu untuk pelayanan Samsat Keliling (Samling) dan Samsat Gendong (Samdong), Sirwan memastikan akan kembali dilanjutkan tahun 2021. Ditambah lagi proses pelayanan Samsat akan tetap dilanjutkan di pasar-pasar. "Proses pemba-

yaran pajak akan dimudahkan. Samsat akan terus hadir di desa dan pasar tahun depan," jelas Sirwan.

Sementara itu Kasat Lantas Polres BS Iptu. Eka Ardiansyah mengajak masyarakat untuk tetap patuh aturan lalu lintas. Salah satunya melengkapi surat kendaraan.

Dia mengatakan, saat ini banyak motor bodong, dan dicurigai motor tanpa surat adalah hasil curian. Untuk itu dia mengharapkan masyarakat selalu melengkapi surat motor atau mobil. "Tujuan razia salah satunya meminimalisir pergerakan curanmor. Kalau surat menyurut motor atau mobil tidak lengkap siap-siap diamankan," tegasnya. (tek)

Kemenag Imbau Masjid Perketat Prokes

PASAR MANNA - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) BS mengimbau seluruh masjid di 11 kecamatan memperketat protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19 bagi para jamaahnya. Mulai dari jaga jarak, memakai masker hingga penggunaan ambal masjid.

Hal itu untuk mencegah ada klaster baru Covid-19 di rumah ibadah khususnya masjid. Selain masjid, Kemenag juga mengingatkan semua rumah ibadah lainnya di BS untuk memperketat prokes. Kepala Kantor Kemenag BS, H. Arsan S. Ibrahim, M.Hi menilai saat ini masyarakat mulai kendor untuk menaati prokes. Mulai dari tidak jaga jarak, tempat cuci tangan mulai habis hingga masalah masker dan ambal masjid.

Arsan menyebutkan saat ini kondisi BS kasus Covid-19 semakin tinggi. Bahkan Pemkab BS telah mengeluarkan edaran agar tidak ada lagi keramaian. Untuk itu

dia berharap masyarakat di rumah ibadah untuk dapat mematuhi semua aturan Pemkab BS.

"Kembali seperti awal awal kasus Covid-19 dulu, semua aturan prokes wajib di patuhi," terang Arsan.

Selain itu Kemenag juga meminta semua kegiatan agama yang sifatnya mengumpulkan orang banyak untuk dihentikan sementara. Seperti kegiatan takziah, pengajian belum diperbolehkan oleh pemerintah karena membuat kerumunan serta kegiatan lainnya yang bisa membuat kerumunan.

"Di Kemenag juga pengajian sudah tidak berkumpul lagi, kami melalui daring. Untuk itu masyarakat juga diminta agar menghentikan semuanya yang membuat kerumunan," ajak Arsan.

Imbauan ini juga sampai Arsan untuk dapat disampaikan oleh seluruh penyuluh agama yang tersebar di 142 desa dan 16 kelurahan di BS. (tek)



ARSAN S. IBRAHIM

TOKO UD PARNASON JR Menjual Alat dan Bahan Bangunan

PROMO KERAMIK Ukuran 40 x 40, Hanya Rp. 43.000, Saja

PROMO SENG WARNA Hanya Rp. 850.000

Bisa Kredit Melalui Home Credit, Bunga 0%

Info Pemesanan : 082371728128, atau 082281510870

Alamat Jl. RT. Martadinata, PG Dewa (Depan SPBU Bumi Ayu), Kota Bengkulu

PENGADAAN Pinta Jendel Pabrik UPVC, Pijena Gypsum, Pijena PVC, Baja Ringan

Jln. Utara Bengkulu - Manna KM.5 Kel. Babatan Kec. Sukaraja Kota Bengkulu. Telp/WA. 082281510870

INFO KULINER BENGKULU

FORTUNA CAFÉ DAN RESTO

Alamat: Jl. Rafflesia Kel. Nusa Indah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Reservasi: HP. 0813-9841-5974

SOTO #CAKKHAFI

Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511

SAMBEL MERCON 3

Alamat: Simpang Bumi Ayu Kec. Selebar Kota Bengkulu

KEDAI KOPI GADING CEMPAKA

Alamat: Jalan Batanghari Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu Hub: HP. 08117321511

Reunion Resto

Alamat: Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Reservasi Hub : HP. 08536692224

Bakso O' Boss

Jl. Raya Rafflesia No.42 Nusa Indah - Kec. Ratu Agung - Kota Bengkulu

dailycious all things delicious

Alamat: Jln. Merapi Raya No.107 Kebun Tebeng - Kota Bengkulu HP. 082333338251

KING BAKSO RAJANYA BAKSO

Alamat: Jln. Soeprato No.92 Kebun Geran - Kota Bengkulu

Syarah BAKERY

Alamat: Jln. Mahakam 4 Lingkar Barat No.15 Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 081367285252

LIVE MUSIC

Alamat: Jln. Jenggulu 1 Ujung Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu HP. 082374702196 / 081273487999

Dapur Berandung OPEN NEW NORMAL

Jl. ADAM MALIK (SAMPING BENGKEL BLEBONG) PAGAR DEWA KOTA BENGKULU

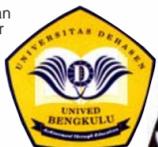
Ruang Promosi Kuliner

Ruang Promosi Kuliner

WISUDA PROGRAM DIPLOMA DAN SARJANA PERIODE III UNIVED

UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU (UNIVED), Selasa (22/12), menggelar rapat senat terbuka wisuda program diploma dan sarjana periode III tahun 2020 yang langsung dipimpin Ketua Senat Universitas sekaligus Wakil Rektor dan Dekan Fakultas. Wisuda digelar di Grage Hotel Bengkulu. Walaupun di masa new normal Pandemi Covid-19, wisuda dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Wisudawan, civitas akademika Unived dan tamu undangan sebelum memasuki gedung wajib mencuci tangan, memakai masker serta menjaga jarak. Sebanyak 256 mahasiswa diwisuda. Wisuda dibagi menjadi 3 sesi. Sesi 1 dimulai Pukul 08.00 s/d 10.45 WIB untuk 74 wisudawan Fakultas Ekonomi dan 7 wisudawan Fakultas

Hukum, Sesi 2 Pukul 11.00 s/d 13.00 WIB untuk 69 Wisudawan Fakultas Ilmu Komputer dan 16 Wisudawan Fakultas Pertanian. Sesi 3 Pukul 13.30 s/d 15.00 WIB untuk 15 wisudawan Fakultas Ilmu-ilmu sosial, 9 wisudawan Fakultas Sastra, 42 wisudawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan 24 wisudawan Fakultas Ilmu Kesehatan. Hadir dalam wisuda ketua BPH Yayasan Dehasen Dr. Drs. H. Bando Amin C Kader., MM, Wakil Ketua Yayasan Dehasen Hj. Ica Rakizah Syafrie, M.Kes, Wakil Gubernur Bengkulu H. Dedy Ermansyah, SE, Perwakilan BNI, perwakilan Polda Bengkulu, civitas akademika Unived, orang tua wisudawan serta tamu undangan.(van)



ARAHAN: Ketua BPH Yayasan Dehasen Dr. Drs. H. Bando Amin C Kader., MM menyampaikan arahan.



KATA SAMBUTAN, LAPORAN DAN PEMBACAAN SK: Wakil Gubernur Bengkulu H. Dedy Ermansyah, SE menyampaikan kata sambutan dilanjutkan laporan oleh Rektor Unived Prof. Dr. Kamaludin, SE, MM serta pembacaan SK kelulusan oleh Wakil Rektor II Dr. Rita Prima, M.Si,



SERAH IJAZAH: Secara simbolis Dekan Fakultas Ekonomi Dr. Suwarni, MM dan Dekan Fikes menyerahkan ijazah kepada wisudawan.



PROSESI WISUDA: Rektor Unived Prof. Dr. Kamaludin, SE, MM secara simbolis memindahkan kunci wisudawan, menandakan berakhirnya masa perkuliahan dan berhak menyanggah gelar sarjana dan diploma.



HARI IBU: Wisuda bertepatan dengan Hari Ibu, Ketua BPH Yayasan Dehasen Dr. Drs. H. Bando Amin C Kader., MM memberikan karangan bunga kepada sang Istri Hj. Ica Rakizah Syafrie, M.Kes sebagai bentuk kasih sayang.



WISUDAWAN: Kegembiraan terpancar dari wisudawan yang diwisuda dan berhak menyanggah gelar sarjana, diploma dan profesi.



SENAT UNIVED: Rapat terbuka senat Unived wisuda program diploma dan sarjana Periode III tahun 2020 dipimpin ketua senat Unived didampingi anggota senat.



LULUSAN TERBAIK: Ketua BPH Yayasan Dehasen, Wakil Ketua Yayasan Dehasen, senat beserta anggota dan wakil gubernur Bengkulu, berfoto bersama wisudawan lulusan terbaik dan temuda beserta orangtua selepas menyerahkan plakat, uang pembinaan dan selempang.



KELUARGA WISUDAWAN: Bangga dan terharu, orangtua mengantarkan dan menyaksikan wisudawan yang diwisuda.

PEMULIHAN LAHAN DI HARI BULAN MENANAM BERSAMA

Peringati Hari Bulan Menanam Bersama BPDASHL Ketahun bersama FOR DAS melakukan pemulihan lahan yaitu dengan menanam 500 pohon buah-buahan di Kelurahan Sidomulyo tepatnya di calon Sekolah Lapang Konservasi Lahan dan Air-Nusantara Farm pada Selasa (22/12). Kegiatan ini dibuka oleh kepala DLHK Provinsi Bengkulu Sorjum Ahyan dan dihadiri langsung oleh kepala BPDASHL Irpana Nur, S. Hut. MSc, kepala BPBD Provinsi Bengkulu Rusdi Bakar dan Ketua FOR DAS Provinsi Bengkulu, Joni Irawan. (And/prw)



KOMPAK: Kepala BPDASHL Ketahun bersama Kepala Dinas LHK, Kepala BPBD, dan ketua FOR DAS melakukan foto bersama.



SAMBUTAN: Kepala BPDASHL Ketahun Irpana Nur, S.Hut. MSc memberikan sambutan.



SAMBUTAN: Ketua FOR DAS Prov Bengkulu Joni Irawan memberikan sambutan.



BUKA: Kepala Dinas LHK Sorjum Ahyan memberikan sambutan sekaligus membuka acara.



TAMU: Para tamu undangan yang hadir dalam acara penanaman langsung di lokasi penanaman.



TANAM: Kepala BPDASHL Ketahun Irpana Nur, S. Hut. M.Sc melakukan penanaman pohon.

ALL NEW

XSR155

SPORT HERITAGE

Speedometer Full LCD Bergaya Klasik

Ban Dual Purpose Tubeless

Desain Jok Bergaya Klasik

Lampu LED Bergaya Klasik

BORN TO BE FREE

BEST OF SPORT RETRO 2020 - Otopomotif Award 2020 -

yamaha.thamrin.bengkulu

Turkey Explore

Rp. 13.800.000

Depotban Diric Khusus: Don Souvenir Cantik
 Untub Yang DP 1/d 17 Agustus 2020 !!!
 GRAND MASJID - GREEN MOSQUE & TOMBI-SILY
 MARKET - ELPHESER-MENCIH CITY - TURKISH
 LEATHER & CLOTH - COTTON CASTLE - MEVANA
 MUSEUM - GONDARAK UNDERGROUND CITY - ANIANG
 POTERY TULLARIE - SHE-LACE - ARTIKUMAUSELUNG
 CAMELCA-HILL - BOSPHORUS CRUISE - GRAND
 BAZAAR - HADA SOPHIA - TOKRABI PALACE

12-21 Oct 2020
 09-18 Nov 2020
 23 Nov - 02 Des 2020
 24 Nov - 03 Des 2020 (Khusus Grup Nusatour)

TK57 CGY IST 2100 - 0500
 TK56 IST CGY 0220 - 1800

Contact Person :
 0812 9296 976 (Rose), 0813 7783 8875 (Yenny)



SUZUKI ALL NEW **ERTIGA** DP Mulai 20Jtan*
GEMERLAP SUZUKI Hadiah Langsung Emas LM 2 s.d 10g*
 GRATIS Olie - Sparepart s.d 50.000km*
IGNIS DP Mulai 15Jtan*
CARRY DP Mulai 12Jtan*
PT. KANGAROO MOTOR MANDIRI
 Head Office : Jl. May Jend Sutowo No. 88 Kota Bengkulu. Telp. (0736) 28888/ 085 2222 11 767
 Outlet Pemarik : Jl. Lintas Bengkulu Padang Ds. Sidodadi Pemarik. Telp. 0852-6835-8888
 Outlet Camp : Jl. Durian Depan (Simpang Merigi) Kab. Kepahiang. Telp. 0821-7595-9529
 Outlet Manna : Jl. Ahmad Yani Kec. Ibul Kota Manna. Telp. 0821-2314-9543
 Jam Kerja Bengkulu : Senin - Jumat : 08.30wib - 18.30 WIB Sabtu : 08.30wib - 12.30 WIB
 Hotline Service : 0821-7573-6233



CV. CENTRAL ELEKTRO
 JALAN SALAK RAYA NO. 99 LINGKAR TIMUR, KOTA BENGKULU
 0736 7324 996 central_elektro.bki
 0811 7360 422 centralelektobengkulu.com
 • PENGADAAN AC HIKVISION
 • PENJUALAN AC
 • SERVICE AC
 • SPARE PART AC
 • RENTAL AC DAN KIPAS EMBUN
 • CCTV & SECURITY SYSTEM
 DAIKIN

Tak Mesti Pemilik Suara Terbanyak Dua

BENGKULU - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian dua anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Yakni Imron Rosyadi dari fraksi Golkar dan Edison Simbolon dari fraksi Demokrat. Keduanya mundur lantaran mengikuti pemilihan kepala daerah.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu instruksi dari DPD Partai Golkar terkait PAW itu.

"Menunggu sidang pleno DPD dulu, kemarin kan pleno rekapitulasi penghitungan suara KPU Provinsi sudah ya. Semuanya tergantung mekanisme partai," kata Sumardi, kemarin (22/12).

Dijelaskannya, untuk kandidat yakni 3 calon yang meraih suara di bawah Imron Rosyadi dalam pemilihan legislatif lalu. Berdasarkan jumlah suara ada tiga kandidat untuk pengisi PAW itu. Diantaranya Baharjo Sudiro, S. Sos dengan 4.083 suara, Sunandar S. Sos memiliki 2.541 suara, serta Malniarti, SE dengan 2.189 suara. Dimana ketiganya ini merupakan wakil Bengkulu Utara dan Benteng.

"Kalau kita lebih cepat lebih bagus, kalau kita difraksi tinggal menerima saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tukasnya.

☞ Baca **TAK..** Hal 15

Resepsi Pernikahan Tetap Dilarang

BENGKULU - Resepsi atau pesta pernikahan untuk sementara waktu masih tetap dilarang oleh Pemkot Bengkulu. Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan, Surat Edaran (SE) Walikota tentang Penghentian Kegiatan Keramaian atau Kerumunan, demi kebaikan bersama. Hal ini disampaikan Dedy menyikapi aksi unjuk rasa para pekerja wedding organizer, seperti perias pengantin, pelaminan, photographer, dekor, catering, organ tunggal, penyanyi dan lainnya, Senin (21/12) kemarin lusa.

"Jika angka positif Covid-19 sudah menurun, kami akan mengeluarkan surat edaran terbaru dilonggarkan, tetapi masih tinggi di atas 100. Mohon di maklumi ini demi kebaikan kita bersama," kata Dedy.

Lalu apa solusi untuk para pekerja wedding yang tedampak dari SE Walikota itu. Dimana usaha mereka mati suri dengan adanya larangan resepsi pernikahan.

"Saya tidak tahu kalau daerah lain ada apa tidak APBD kita sangat terbatas. Itu yang harus dipahami juga, ini untuk kemanusiaan. Kita pilih misalnya, satu sisi ekonomi berputar atau makin banyak meninggal, pilih orang mati atau orang hidup," ujarnya.

Dia menjelaskan, untuk pernikahan tetap bisa dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Misalnya, acara pernikahan, ijab kabulnya hanya dihadiri beberapa orang saja. Sedangkan untuk pesta pernikahan ditunda sementara waktu.

☞ Baca **RESEPSI..** Hal 15

Kejari dan Pemkot Kerja Sama Pemulihan Ekonomi



SILATURAHMI: Kejari Bengkulu dan Pemkot menjalin silaturahmi, Selasa (22/12).

BENGKULU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Irene Putrie yang baru saja dilantik, saat bersilaturahmi ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu berharap bisa menjalin kerjasama yang baik dengan Pemkot kedepannya. Serta akan mendukung program-program Pemkot terutama dalam pemulihan perekonomian dalam penanganan Covid-19.

"Harapannya kerjasama yang terjalin selama ini bisa dilanjutkan. Kita bisa mendukung program-program yang dilakukan oleh Pemkot terutama program pemulihan ekonomi dalam konteks penanganan Covid-19," kata Irene Putrie.

Kedatangan Kajari Bengkulu dengan jajarannya ini disambut langsung Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, SE, MM.

☞ Baca **KEJARI..** Hal 15

Seragam Gratis Diduga jadi Proyek

PGRI Temukan Penyaluran Tidak Sesuai Perwal

BENGKULU - Program seragam gratis yang digelontorkan oleh Pemkot Bengkulu, diduga menjadi lahan proyek. Sebab Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bengkulu, mendapatkan laporan jika penyaluran bantuan seragam

gratis berupa uang ini, menyalahi Peraturan Walikota (Perwal). Yakni Perwal Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan pada Peserta Didik yang Orangtua atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikannya.

Ketua PGRI Kota Bengkulu Nawardi mengatakan, di beberapa sekolah di Teluk Segara, beberapa sekolah di Muara Bangkahulu pembagian uang

seragam gratis ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang tertera dalam Perwal tersebut. Dalam Perwal dijelaskan kalau pembagian uang seragam gratis ini ditransferkan melalui buku rekening bank milik orangtua di BPRS Fadhilah.

Namun pada kenyataannya, uang seragam gratis itu diberikan pihak BPRS Fadhilah ke masing-masing sekolah.

☞ Baca **SERAGAM..** Hal 15



NAWARDI



KONFERENSI PERS: Kepala BNNP Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. Toga H Panjaitan mengungkapkan kasus narkoba selama satu tahun ini meningkat 10 kasus dari tahun 2019.

Kasus Narkoba Meningkat

BENGKULU - Sepanjang tahun 2020 ini, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Bengkulu mengungkap sebanyak 24 tersangka dari delapan kasus narkoba. Dibanding tahun 2019 lalu, meningkat 10 kasus dengan 21 tersangka.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BNNP Bengkulu Brigjen. Pol. Drs. Toga H Panjaitan menerangkan, dibandingkan dengan data tahun 2017, angka orang yang terpapar narkoba di Provinsi Bengkulu sebanyak 24.118 orang. Pada tahun

2019, jumlah ini menurun 0,38 persen menjadi 19.698 orang.

"Jumlah penangkapan tersebut merupakan pelaku yang sudah menjadi target operasi kita. Memang di tengah kondisi Covid-19 saat ini kita kekurangan anggaran. Karena banyaknya refocusing dari pemerintah daerah," terangnya saat jumpa pers rilis akhir tahun kemarin, Selasa (22/12) di Kantor BNNP Bengkulu.

Delapan kasus narkoba itu, enam orang dari kalangan swasta dan dua orang nara-

pidana. Mereka ditangkap dengan statusnya sebagai penderas. Barang bukti yang diamankan sabu sebanyak 2.940,74 gram berat bersih, dan ganja 56.200 gram berat bersih. Kemudian untuk wilayah di Kota Bengkulu ada enam kecamatan yang menjadi pantauan pihaknya. Sedangkan peredaran narkoba yang rawan di Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Padang Gucci Kabupaten Kaur.

☞ Baca **KASUS..** Hal 15

Gali Dugaan Pelanggaran

Jaksa Periksa Kabid BM Dinas PUPR Provinsi

BENGKULU - Setelah memeriksa lima orang pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) di Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu kembali memeriksa Kepala Bidang Bina Marga (BM) Dinas PUPR Provinsi Bengkulu Septi Erwandi dan Bendahara Pengeluaran Hendro Wijaya. Mereka berdua diperiksa di ruangan berbeda selama kurang lebih 4 jam.

Keduanya diperiksa terkait dugaan temuan dalam perker-

jaan pemeliharaan jalan tahun 2019 yang tersebar di kabupaten/kota senilai Rp8,5 miliar. Usai memberikan klarifikasi ke penyidik, Septi mengatakan ada tiga pertanyaan yang diberikan penyidik padanya. Selain itu dirinya juga menjelaskan mekanisme sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

"Ada tiga pertanyaan dari penyidik. Itu ada permintaan dari PPTK kemudian disposisi dari Bendahara, kemudian kembali lagi ke kelengkapan baru kita serahkan," terangnya.

☞ Baca **GALI..** Hal 15



SAMPAIKAN: Kepala Bidang Bina Marga Provinsi Bengkulu Septi Erwandi saat dikonfirmasi awak media usai diperiksa.



ASTRA MOTOR
KHUSUS MATIC
GRATIS
 Hanya Rp. 99.000,-*)
 PAKET - A
11 POINT
 Hanya Rp. 65.000,-*)
 PAKET - B
7 POINT
GEBYAR GANTI OLI DI AHASS
 ~ GRATIS OLI GEAR
 ~ GRATIS KONSULTASI TEKNIK
 ~ JAMINAN OLI ASLI
 ~ KEPASTIAN HARGA
 Jasa Service & Oli Mesin
 Oli Gear
 Promo ini berlaku di AHASS wilayah Bengkulu



HONDA
MENGALAMI KENDALA DI JALAN? ATAU MAU SERVICE DI RUMAH?
 HUBUNGI LAYANAN **care** 0819 2500 989 ATAU 1 500 989
 LEBIH MUDAH LEWAT BOOKING SERVICE DI APLIKASI: **MOTORKU**
 DOWNLOAD DI PLAYSTORE REFERRAL CODE: **HNBKBL**

Gali Dugaan Pelanggaran

Sambungan dari hal 9

“Saya hanya melanjutkan,” singkatnya. Sementara itu, Aspidus Kejati Bengkulu Pandoe Pramoe Kartika membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pandoe mengatakan, pihaknya belum menemukan adanya kerugian negara atau unsur melawan hukum karena masih dalam proses pemeriksaan.

“Sekarang ini kita banyak melakukan penyelidikan, belum tentu ada temuan kerugian negara atau melawan hukum masih dalam

proses pemeriksaan. Kalau memang tidak ada akan dihentikan,” terangnya.

Sebaliknya apabila kedepan adanya temuan maka pemeriksaan ini terus berjalan.

“Karena masih banyak penyelidikan perkara laporan yang kita terima, untuk ini masih dalam proses pemeriksaan. Diantaranya item pekerjaan ini tersebar di Kabupaten dan Kota, seperti paket pekerjaan dan perawatan, pembersihan selokan, prime coat, hotmix dan lainnya,” paparnya. (wij)

Kasus Narkoba ...

Sambungan dari hal 9

“Dua kecamatan ini selain di Kota Bengkulu merupakan wilayah terbesar peredaran narkoba di Bengkulu. Kita sudah berkordinasi dengan pihak Direktorat Narkoba Polda Bengkulu, kalau tidak ada rintangan tahun depan akan kita gelar operasi razia disana,” tambahnya.

Lanjut Toga, pihaknya meminta agar para korban pemakai narkoba ini hanya dilakukan rehabilitasi. Terhitung ada sebanyak 200 orang direhab akibat penggunaan narkoba di Provinsi Bengkulu. Pelaku bandar menjadi prioritas pertama dalam pemberantasan oleh pihaknya.

“Karena bandar ini membuat masyarakat miskin, mereka rela membayar dengan uang besar agar bisnisnya lancar. Kita meminta agar mereka ini bertaubat saja, ada satu narapidana yang kita akan ajukan bawa ke

nusakambangan karena sudah melakukan kasus berulang kali,” tegas Toga.

Sementara itu, di kalangan para pelajar pun narkoba sudah marak tersebar. Seperti pemakai lem Aibon bahkan ganja berjenis Gorila. Oleh karena itu, pihaknya meminta agar masyarakat melapor apabila mengetahui adanya pemakai narkoba, pihaknya pun memastikan agar untuk status pelapor akan dirahasiakan.

“Para pelajar pun sudah banyak terpapar, seperti menggunakan lem aibon bahkan ada ganja berjenis gorila yang sengaja dipasarkan lewat media sosial. Kita terus gencar dengan P4GN (Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba), oleh karena itu masyarakat yang melapor kita pastikan dirahasiakan statusnya. Lebih baik pemakai dapat langsung direhab agar tidak menjadi bandar narkoba nantinya,” imbua Toga (wij)

Seragam Gratis Diduga ...

Sambungan dari hal 9

Oleh sekolah uang itu digunakan langsung untuk membuat seragam masing-masing siswa baru, tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan orangtua siswa.

“Dalam kenyataan yang tersebut diantar ke sekolah, dan baju seragam dibuat oleh sekolah. Jadi semua baju sudah selesai dibuat sekolah dan tinggal dibagikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Nawardi menjelaskan, dalam Perwal, bantuan seragam gratis ini dalam bentuk uang. Uang itu kemudian digu-

nakan oleh orangtua untuk menjahit atau membeli baju seragam sekolah anaknya masing-masing.

“Dalam rekening orangtua, uang tersebut tidak masuk. Semua dihidend sekolah. Sedangkan sekolah tidak memiliki surat tugas dalam hal ini. Artinya ada indikasi pencucian uang,” jelasnya.

Selain itu, ia mendapatkan informasi para orangtua telah membuat baju sekolah merah putih SD maupun putih biru untuk SMP untuk anak-anak mereka tanpa menggunakan uang bantuan itu. Sehingga membuat pembagian seragam gratis ini dianggap tidak efektif. “Laporan orangtua murid pada umumnya seragam sekolah anaknya sudah dibuat. Jika uang bantuan seragam gratis itu dihidend juga oleh pihak sekolah, mereka tidak bisa menggunakan uang bantuan itu untuk membeli kebutuhan yang lainnya untuk sekolah anak mereka,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Dra. Rosmayetti, MM mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada sekolah-sekolah agar tetap mempedomani Juknis yang telah dibuat agar menyalahi aturan yang telah ada.

“Yang jelas Juknis dan Perwal telah kita sampaikan ke sekolah-sekolah. Artinya mereka tidak melakukan aturan yang telah kita sampaikan. Kita berharap sekolah pedomani Perwal dan juknis yang telah disampaikan,” ujarnya.

Ia juga membantah adanya infomasi Dinas Pendidikan yang mengkomodir pembuatan seragam sekolah gratis. Terkait sanksi jika ada yang tidak mengikuti aturan, pihaknya akan menurunkan tim untuk melihat pelanggaran tersebut dimana, dan sanksinya tergantung dengan salah apa yang telah dilakukan. “Jika tidak sesuai tentu ada tim yang akan terjun melihat dan sanksi kita lihat nanti kesalahannya apa,” jelasnya.

Dia menjelaskan, kalau untuk seragam batik khusus sekolah, memang sekolah yang merekomendasi tempat pembuatannya. Namun untuk seragam nasional orangtua bisa membuat dimana saja. Asalkan mereka memberi bukti nota pembelian ke Dinas Pendidikan. (juu)



HADIRI EKPOSE: Gubernur Bengkulu saat menghadiri ekpose pengurus Masjid Raya Baitul Izzah terkait rencana pemanfaatan eks kantor Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Selasa (22/12).

Pengembangan Masjid Raya Dilanjutkan

Eks Kantor DTPHP Dihilangkan

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengatakan pembangunan dan pengembangan Masjid Raya Baitul Izzah yang sempat terhenti imbas Covid-19, tahun depan kembali akan dilanjutkan. Bahkan Pemprov berencana menghilangkan eks kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Perkebunan (DTPHP) untuk dijadikan Islamic Center Masjid Raya.

“Kita secara keseluruhan akan menghilangkan eks kantor Dinas TPHP yang berada tepat di sebelah masjid.

Akan kita tata menjadi pusat sekolah atau pusat pendidikan Masjid Raya Baitul Izzah, dari PAUD sampai SMP” ujar Rohidin usai mendengarkan

ekspose pengurus Masjid Raya Baitul Izzah terkait rencana pemanfaatan eks kantor Dinas TPHP Provinsi Bengkulu, Selasa (22/12).

Rohidin menerangkan, pembangunan dan pengembangan Masjid Raya Baitul Izzah ini sudah dilakukan beberapa tahun dimulai sejak tahun 2018 dan 2019. Sedangkan untuk eks lahan Dinas TPHP akan dimanfaatkan untuk pengembangan Islamic Center Masjid Raya Baitul Izzah. Selain penyempurnaan dari renovasi sebelumnya yang sempat terhenti di tahun 2020 ini akibat Covid-19.

“Kita ingin memastikan bahwa ini nanti betul-betul menjadi sebuah kawasan pusat pengembangan ke-Islaman,” tegas Rohidin.

Rohidin berharap, dengan pemban-

gunaan Islamic Center ini akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat kedepannya. Selain nanti sebagai pusat pendidikan keagamaan, dapat menjadi pusat perbelanjaannya, tempat kuliner, lalu Baitul Mallnya, ada fungsi sosial pembinaan keagamaan. Termasuk media seperti radio sebagai media sosialisasi akan dipusatkan disini.

“Kemudian mungkin nanti ada ruang kantor pengelola. Kita juga sedang mendesain beberapa titik lokasi - lokasi parkir yang minimum 200 hingga 250 mobil, dan lokasi parkirnya juga,” terangnya.

Ikut hadir dalam ekpose kemarin Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah, Kadis PU, Kepala BPKD, Kepala Bappeda, Kepala DTPHP dan Karo Pemkesra. (key)

Kapolda Serahkan Bantuan Bedah Rumah



RESMIKAN: Kapolda Bengkulu meresmikan bedah rumah dan bakti sosial.

Camat Teluk Segara.

Dalam sambutannya, Kapolda Bengkulu Irjen Pol Drs. Teguh Sarwono, M.Si mengatakan bahwa Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Alumni DTT & SMDE sejawaran Polda Bengkulu. Karena telah mengabdikan sebagai anggota Polri selama 20 tahun.

“Selain itu memang bantuan bedah rumah yang kami berikan ini memang benar-benar harus menge-

Dana pembangunan tersebut merupakan dana dari sumbangan para alumni, serta kegiatan ini dilakukan merupakan suatu ungkapan rasa syukur dari seluruh anggota DTT & SMDE sejawaran Polda Bengkulu.

“Selain itu memang bantuan bedah rumah yang kami berikan ini memang benar-benar harus menge-

nai sasaran, agar masyarakat yang mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut dapat benar-benar terbantu. Seperti keluarga Bapak Harmaizi yang mendapatkan bantuan bedah rumah tersebut. Pasalnya sudah tidak bisa bekerja, dikarenakan sakit. Hanya Ibu Yuniarita yang menjadi tulang punggung keluarga dan rumah yang ditinggali sudah tidak layak huni,” paparnya.

Selanjutnya harapan dari kegiatan ini, senantiasa agar Alumni DTT dan SMDE sejawaran Polda Bengkulu yang di ketuai AKP Yosril, SH, MH, dapat terus mengabdikan, berkarya dan berguna bagi masyarakat bangsa dan negara, terkait bakti sosial yang dilaksanakan.

Terakhir pemberian sembah kepada masyarakat sekitar, juga termasuk tali asih untuk anak yatim dan yatim piatu. (Rls/wij)

Resepsi Pernikahan Tetap ...

Sambungan dari hal 9

“Awal Covid-19 sempat tinggi namun ada angka yang melandai pesta per-

nikahan diperbolehkan namun amanah yang diberikan itu fakta di lapangan ketika peserta pernikahan banyak sekali

yang melanggar dan tidak patuh protokol kesehatan,” jelasnya.

SE Walikota dikeluarkan lantaran akhir-akhir

ini terjadi lonjakan kasus positif Covid-19. Maka dari itu dengan SE Walikota dilarang berkerumun. (juu)

Tak Mesti Pemilik Suara Terbanyak ...

Sambungan dari hal 9

Ia menjelaskan bahwa peluang dari ketiga kandidat ini masih memiliki potensi yang sama. Menurutnya, jika berdasarkan aturan

yang berlaku itu memper-

tingkatkan jumlah suara. Tidak menutup kemungkinan, kata Sumardi, jika suara terbanyak pertama, kedua, itu adalah anggota yang sudah non aktif. Sehingga, dimungkinkan melompat ke suara ke tiga.

“Ya kalau sudah tidak aktif lagi di partai, ini misalnya ya. Atau dia melanggar kode etik, itu jadi pertimbangan.

Tapi jika itu semuanya tidak terjadi, maka sesuai dengan ketentuan, berdasarkan suara terbanyak,” jelas Sumardi.

Terpisah, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Bengkulu, Suhardi mengatakan untuk penunjukan PAW Ketua Demokrat Provinsi Bengkulu, Edison Simbolon saat ini masih dalam proses. Dan untuk

kandidat calonnya, ia hanya menyebutkan nama Risman Sipayung dengan 1.119 suara dari Dapil Kota Bengkulu. Yang merupakan suara terbanyak setelah Edison Simbolon.

“Seperti dengan undang-undang itu suara terbanyak kedua itu yang menggantikan. Makanya itu akan diverifikasi ke KPU betul apa tidaknya,” imbuhnya. (war)

Kejari dan Pemkot Kerja Sama ...

Sambungan dari hal 9

Kemudian Walikota Helmi Hasan, SE juga melakukan penyambutan secara virtual. Lantaran dia tengah berada di Jakarta.

Helmi Hasan juga mengatakan ada beberapa program Pemkot dan langkah-langkah Pemkot bersama Forkopimda dalam menangani Covid-19.

“Alhamdulillah, selama ini Pemkot Bengkulu terus memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya ialah kita membuat rumah sakit. Dulu rumah sakit ini belum ada, karena kita lebih mementingkan khalayak banyak, jadi kantor Walikota kita jadikan rumah sakit untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan,” jelas Helmi.

Selanjutnya, di masa pan-

demis seperti ini Pemkot terus mengambil kebijakan-kebijakan untuk masyarakat agar tidak terpapar Covid-19. Yang diawal pandemi, kita meminta masyarakat untuk stay at home (berdiam di rumah). Setelah itu, Pemkot membagikan beras dan mie selama mereka diam di rumah dan berbagai kebijakan maupun bantuan lainnya. (juu)

LAYANAN SMS PDAM KOTA BENGKULU

Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.

Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.

UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke **0821 8613 4569** sbb:
a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan /keluhan

Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

Surya Orlana, SE, M.Si
Ket. Bidang Persejahteraan Masyarakat

KOMODITI	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN	
1. BERAS	SR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000	
	SR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000	
	Mangga Manis (Premium)	kg	12.500	
	Kembang Koi (Premium)	kg	11.500	
2. GULA PASIR	Terbaru	kg	9.375	
	Cap Bulung/ Dolag	kg	9.375	
	DN	kg	12.500	
	Bimoli Kamasan	1 liter	15.000	
3. MINYAK Goreng	Tangga Merah	1 liter	12.150	
	Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000	
	Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000	
	Sandung Lamur	kg	80.000	
4. DAGING	Tetelan	kg	60.000	
	Has Luar	kg	120.000	
	Has Dalam	kg	120.000	
	Daging Ayam Broiler	kg	34.000	
5. TELUR	Daging Ayam Kampung	kg	65.000	
	Telur Ayam Broiler	kg	25.000	
	Telur Ayam Kampung	kg	52.000	
	Cabe Merah Keriting	kg	42.000	
6. Cabe Rawit Hijau	Cabe Rawit Hijau	kg	25.000	
	Merah	kg	35.000	
	Putih	kg	26.000	
	Susu Kental Manis	370 gr	11.000	
9. Garam	Bendera	370 gr	10.000	
	Indonesi	kg	13.000	
	Kacang	kg	8.600	
	Kedelai Eks Impor	kg	25.000	
10. Ikan	Hijau	kg	23.000	
	Kari Ayam	kg	3.000	
	Kain Teni	kg	60.000	
	Kembung	kg	35.000	
12. Mie Instan	Segar Tongkol/ Tuna	kg	25.000	
	7.000	kg	7.000	
	11. Jagung Pipilan Kering	kg	7.000	
	13. Paku 3 cm (1 1/2 inch)	kg	20.000	
14. Paku 4 cm (2 inch)	17.000	kg	17.000	
	15. Paku 5 cm (2 1/2 inch)	kg	20.000	
	16. Paku 7 cm (3 inch)	kg	17.000	
	17. Paku 10 cm (4 inch)	kg	17.000	
18. Pupuk KCL	7.000	kg	7.000	
	19. Pupuk NPK (Mutiar)	kg	2.000	
	20. Pupuk SP36	kg	2.000	
	21. Pupuk Urea	kg	7.000	
22. Pupuk ZA	1.400	kg	1.400	
	23. Gas LPG 3 kg	18.000	kg	18.000
	24. Bata Ring	91.000	kg	91.000

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Banitoto

LINTAS

2021, Reklame Nakal Diturunkan

PELABAI - Masuk tahun 2021, seluruh reklame atau papan merek yang tidak dilengkapi izin akan diturunkan. Saat ini Bidang Pendapatan, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong tengah mendata legalitas seluruh objek pajak pengguna reklame. "Reklame baru bisa dipasang lagi jika sudah ada izin," kata Kabid Pendapatan, BKD Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak.

Diakuinya, penertiban itu sudah direncanakan sejak awal tahun ini. Namun terkendala karena pandemi Covid-19. Lantaran saat ini Pemkab Lebong telah menerapkan status new normal, tentunya sejumlah kegiatan yang menjadi tugas BKD akan dijalankan secara normal kembali. "Dalam teknisnya, kami tetap mengedepankan protokol kesehatan," tutur Rudi.

Sebelum melakukan penertiban yang teknisnya melibatkan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pihak BKD akan koordinasi dulu ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Itu untuk memastikan jumlah pengguna reklame yang mengantongi izin. "Kalau tidak ada izin, tentunya pajaknya tidak bisa dipungut sehingga sangat merugikan daerah," jelas Rudi.

Tidak dipungkirinya, penggunaan reklame di Kabupaten Lebong sangat tinggi. Mulai dari minimarket, hotel, rumah makan hingga seluruh pertokoan yang dijadikan sebagai tempat usaha. Sesuai survei yang dilakukan BKD, terdapat ribuan unit reklame dipasang di setiap titik-titik strategis. "Sementara realisasinya hanya puluhan pengguna reklame yang rutin bayar pajak," papar Rudi.

Terkait target pajak reklame yang hanya ditetapkan Rp 40 juta per tahun oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong sejak 3 tahun terakhir, Rudi mengaku itu ditetapkan berdasarkan potensi yang ada. Dimana pengguna reklame yang rutin membayar pajak hanya berkisar 30 persen dari total pengguna. "Makanya akan kami telusuri lagi mana yang berizin dan tidak, untuk yang berizin wajib bayar pajak, yang tidak berizin diturunkan," tegas Rudi. (sca)

Pantau Progres Fisik Pembangunan

PELABAI - Seiring penghujung tahun anggaran, Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Mahdi, S.Sos mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebong proaktif mengawasi hasil pembangunan. Khususnya untuk pembangunan fisik yang saat ini belum juga selesai pekerjaannya. "Jangan masyarakat bersikap acuh," kata Mahdi.

Pentingnya pengawasan dari masyarakat bertujuan agar hasil pembangunan yang dicanangkan pemerintah benar-benar menasarak kepada kepentingan masyarakat. Ketika ada temuan kegalangan yang terjadi atas kegiatan yang tengah dikerjakan, diharapkan masyarakat melapor. "Bisa melalui BPD (badan pemusyawaratan desa, red) dan DPRD atau sampaikan langsung ke OPD (organisasi perangkat daerah, red) teknis pelaksana," ungkap Mahdi.

Dipastikannya, DPRD juga akan memaksimalkan fungsi pengawasan dalam pembangunan yang dicanangkan Pemkab Lebong. Namun tanpa adanya peran masyarakat, sulit bagi DPRD mengawasi keseluruhan pembangunan yang dilaksanakan eksekutif karena jumlahnya yang tidak sedikit. "Kami juga mengingatkan OPD teknis dan rekanan agar benar-benar mengerjakan pembangunan dengan maksimal," tutur Mahdi.

Dalam setiap pekerjaan yang bersumber dari APBN dan APBD, termasuk pekerjaan yang sumbernya Dana Desa (DD), diingatkannya agar pelaksana tetap memasang papan merek sepanjang pekerjaan belum tuntas dan diserahterimakan. Itu dalam rangka informasi dan transparansi pembangunan guna menghindari fitnah. Pekerjaan fisik yang tidak dilengkapi papan merek patut dicurigai.

"Jadi dalam teknis pengerjaannya harus benar-benar terbuka agar tidak membuka peluang penyimpangan dalam pembangunan," jelas Mahdi.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengatakan, secara umum pembangunan yang telah dianggarkan dalam APBD tahun ini telah selesai dikerjakan dengan baik. Walaupun beberapa diantaranya ditunda karena anggarannya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19.

"Namun untuk pekerjaan yang dilaksanakan, kami sudah mewanti OPD (organisasi perangkat daerah, red) segera menuntaskannya sebelum kontrak berakhir," tukas Sekda. (sca)



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

AYO MULAI DARI DIRI SENDIRI JAGA LEBONG DARI PENYEBARAN COVID-19

Kami Mengimbuu Masyarakat
Tidak Menggelar Pesta yang Mengundang Kerumunan
Demi Mencegah Timbulnya Klaster Baru
Penyebaran Covid-19
serta Tetap Mematuhi Protokol Kesehatan







RIS/RB

SEPI: Suasana di Sekretariat KPU Lebong menunggu penetapan paslon bupati dan wakil bupati Lebong terpilih.

Banyak Warga Tidak Terima Masker Bantuan

PELABAI - Tidak hanya lamban, pembagian masker gratis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lebong kepada masyarakat, diduga tidak merata. Tidak semua masyarakat menerima karena jumlahnya yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lebong. "Kami sekeluarga tidak menerima masker gratis itu," ujar Ujang (35), warga Kelurahan Amen, Kecamatan Amen.

Senada disampaikan Lukman (45), warga Kelurahan Pasar Muara Aman, Kecamatan Lebong Utara yang juga mengaku tidak kebagian masker yang teknisnya dibagikan melalui perangkat desa dan kelurahan itu. Sekalipun mampu membeli masker sendiri, ia menilai tidak meratanya pembagian masker gratis dari pemerintah

menunjukkan ketidaksiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong dalam menangani pandemi Covid-19. "Kalau bicara soal resiko yang tidak mengenal kasta, seharusnya masker dibagikan ke seluruh warga tanpa pandang bulu," terang Lukman.

Sementara Kepala Dinkes Kabupaten Lebong, Rachman, SKM, M.Si belum berhasil dikonfirmasi. Namun sebelumnya ia mengkalim telah membagikan 50 ribu masker kain kepada masyarakat. Masker itu merupakan pengadaan dari Dana Tak Terduga (DTT) khusus penanganan Covid-19 yang diposkan untuk Dinkes dengan nilai Rp 250 juta. Sebelumnya dana yang disiapkan untuk pembelian masker mencapai Rp 500 juta. (sca)

Ditemukan Sudah Membusuk Sepuluh Hari Hilang

LEBONG TENGAH - Kasus penemuan mayat di Desa Tanjung Bunga I, Kecamatan Lebong Tengah pukul 10.00 WIB kemarin (22/12) masih didalami Polsek Lebong Tengah. Namun dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan saksi, polisi tidak menemukan bukti yang mengindikasikan kematian korban mengarah ke pidana. Diduga kematian Sandiharjo (87), warga Desa Semelako III, Kecamatan Lebong Tengah itu karena kelaparan.

Terlebih, pria uzur itu sudah mengidap pikun sehingga diyakini tidak ingat jalan pulang ke rumahnya. Dalam kondisi tersesat itulah, diyakini korban kelaparan diperparah oleh kondisi cuaca yang dingin. "Dari hasil visum, tidak ada tanda kekerasan di tubuh korban," tegas Kapolres Lebong, AKBP. Ichsan Nur, S.IK melalui Kapolsek Lebong Tengah, Iptu. Kuart Santosa, SH.

Dijelaskannya, identitas korban dipastikan oleh menantunya, Sanul (75). Kendati ciri fisiknya sudah tak dapat dikenali, Sanul meyakini jasad itu adalah Sandiharjo karena menemukan celana milik koban akjauh dari posisi jasad korban.

"Walaupun tidak ada indikasi pidana, kami tetap akan meminta keterangan pihak keluarganya untuk memastikan kematian korban," jelas Kuart.

Lebih lanjut Kuart mengatakan, korban me-



ARIS/RB

MEMBUSUK: Jasad warga Semelako yang hilang sepuluh hari lalu, kemarin ninggalkan rumah sejak Sabtu (12/12). Oleh keluarganya sudah dilaporkan ke perangkat desa karena selama ini korban tidak pernah menghilang sampai sehari. "Menurut keluarganya, korban memang sering bepergian, tetapi biasanya tidak jauh," papar Kuart. Data dihimpun, jasad korban ditemukan 3 pemuda yang berniat mencari rebung atau tunas bambu. Masing-masing Edo (25), Piki (22) dan Yoga (24), ketiganya warga Desa Tanjung Bunga II, Kecamatan Lebong Tengah. Saat mendekati rumpun bambu, ketiganya mencium aroma menyengat. Saat semakin dekat, tampak jasad korban. Temuan itu langsung disampaikan ke perangkat Desa Tanjung Bunga hingga akhirnya dilaporkan ke Polsek Lebong Tengah dan dilakukan evakuasi. (sca)

Teguh Terima Sumbangan Terbesar

PELABAI - Dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati (Pilbup) Lebong lalu, pasangan calon (paslon) nomor urut 4, Teguh Raharjo-Nasirwan menerima sumbangan dana kampanye paling besar. Nilainya mencapai Rp 129,5 juta. Sementara sumbangan dana kampanye terkecil diterima paslon nomor urut 2, Armansyah Mursalin-Masropen Irihadi dengan nilai Rp 48,2 juta.

Sedangkan paslon nomor urut 1, Dalhadi Umar-Wawan Fernandez dan paslon nomor urut 3, Kopli Ansori-Fahrurrozi berada di tengah. Kedua paslon ini menerima sumbangan dana kampanye Rp 50 juta.

"Penggunaannya sudah diaudit KAP (kantor akuntan publik, red) dan sudah kami terima hasil auditnya," ujar Divisi Hukum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong, Devi Irawan, SH. Sesuai tahapan, hasil audit

KAP tersebut akan disampaikan ke masing-masing paslon. Selain itu, KPU juga akan mengumumkannya. Jika tidak ada kendala, hasil audit Laporan Dana Kampanye (LDK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) itu akan diumumkan mulai hari ini. "Pengumumannya tiga hari dijadwal berakhir Jumat, 25 Desember," terang Devi.

Dijelaskannya, LDK dan LPSDK dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kepatuhan pengelolaan dana kampanye masing-masing paslon. Dari LDK itu akan tergambar patuh atau tidak patuhnya paslon terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang dana kampanye. "Itu sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan dan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Laporan Dana Kampanye," tutup Devi. (sca)

DBH Lebong Masih Nyangkut Rp 14 M

PELABAI - Hingga saat ini, realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) tahun 2020 untuk Kabupaten Lebong belum seratus persen. Masih menyisakan piutang Rp 14 miliar dari estimasi total yang harus diterima Lebong senilai Rp 40 miliar. Yakni DBH dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara masih kurang bayar Rp 6 miliar dan DBH dari APBD Provinsi Bengkulu kurang bayar Rp 8 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi, S.STP, M.Si melalui Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil, Rudi Hartono, SE, M.Ak mengatakan, pentingnya DBH dibayarkan secara penuh mengingat kondisi keuangan Pemkab Lebong yang saat ini sangat minim seiring pemotongan anggaran untuk Covid-19. Dana itu bisa dimanfaatkan

untuk membayar sejumlah biaya kegiatan pembangunan yang saat ini masih terus berjalan. "Kami berharap DBH bisa direalisasikan sepenuhnya supaya tidak ada kegiatan yang ditunda pembayarannya," kata Rudi.

Mengingat sisa tahun anggaran tinggal sepekan, sudah sepantasnya pemerintah pusat dan provinsi membayar keseluruhan DBH untuk Lebong. DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang tujuannya diserahkan ke daerah untuk mendanai pelaksanaan desentralisasi. Yakni sebagai penyeimbang antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. "Macam-macam, ada DBH pajak dan DBH SDA. Untuk sisa DBH yang belum dibayarkan saya tidak begitu ingat," tukas Erik. (sca)

FREE ANGSURAN 3 BULAN
Khusus Tipe Mobilio

DP 19^{Juta} MULAI **DP 20^{Juta} MULAI**



Info lebih lanjut kunjungi:
<https://honda.arista-group.co.id/dealer/honda-arista-bengkulu>

Jam Buka Showroom
Penjualan : Senin-Sabtu Jam 08.00-19.30 WIB Bengkel : Senin-Sabtu Jam 08.00-17.00 WIB
Minggu Jam 08.00-16.00 WIB

HONDA ARISTA BENGKULU
JL. ADAM MALIK RT 01 RW 01 PAGAR DEWA KOTA BENGKULU
TEL: 0736-5511888

STOK TERBAIK

KORPRI IDAMAN ESTATE
Rumah Type 36 Subsidi

Lokasi: Jl. Korpri IV RT 08 RW 05 - BENTIRING
Milih Rumah Idaman Anda bersama Kami



PROMO BULAN INI **5 Juta** TERIMA KUNCI SKB ANGSURAN MULAI **Rp. 877.741** DIDUKUNG KPR **Bank BTN**

Segera Hubungi..!! ☎ 0852 6791 1112
☎ 0853 8431 2727 ☎ 0821 8265 4441

PT. IDAMAN GRAHA MANDIRI
Kantor Pusat : Rokan No. 8 - 9 Jl. Trikora - Kol. Cempaka Permai
Telp. (0736) 52319 - BENGKULU

PUSAT OBAT KUAT IMPORT/TOCKER

VIMAX OIL & LINTAH OIL
(satu Menit Dioles Langsung Reaksi Tambah Besar dan panjang)

~ **VIMAX OIL** : Menambah ukuran penis tambah besar, tambah panjang 1 x oles langsung reaksi. Hasilnya dalam (3 x pemakaian) permanen untuk selamanya.
~ **PROKOMIL SPRAY** : Khusus untuk tahan lama kuat ereksi 1 x oles tahan untuk satu malam.
~ **Sony Tablet** : Mengobati penyakit yang sudah lama diderita : L. Syahwal/impotensi, K. Manis, M. Enzer, Sakit Pinggang, Sakit Gula, Reumatik, cepat membuang serta memproduksi sperma pria. Menambah kekuatan hubungan suami/istri 100% patent. Tanpa efek samping telah banyak terbukti.....
~ **CREAM PAYUDARA** : Membesarkan, memadamkan, memotokan PAYUDARA, menghilangkan keriput lembek. Hasilnya (3 x oles) langsung kelihatan permanen untuk selamanya.
~ **JUGA TERSEDIA** : P. Langsing, P. Gemuk badan, Pemutih wajah, Peninggi Badan/Pembangkit gairah wanita (prigid) menjadi normal, juga tersedia berbagai merk jamu import yang lain. Tersedia accessories untuk pria/wanita yang super canggih, antik dan modern.

HUBUNGI DISTRIBUTOR **Jl. Tenggiri No.20 Depan Pasar Ikan**
HU - SENG **Kampung Cina Kota Bengkulu**
HP. 0821 8270 7707

Pesanan : Dalam kota dilantar - luar kota dikirim



RENCANA KERJA PEMERINTAH 2021: Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Bappeda Ujung Tombak Perencanaan Provinsi Bengkulu

Tetap Produktif di Era Pandemi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu yang dipimpin oleh Isnan Fajri, S.Sos, M.Kes selama tahun 2020 telah melaksanakan serangkaian kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang telah direncanakan. Seluruh proses pelaksanaan kegiatan yang terlaksana di tahun 2020 tidak terlepas dari upaya dan kerja keras seluruh ASN Bappeda Provinsi Bengkulu guna menciptakan Bengkulu Maju dan Sejahtera. #tetapsemangatmembangunbengkulu. (ahandra/prw)



PENILAIAN KERJA: Rapat kerja penilaian kinerja Kabupaten/kota dalam intervensi penurunan stunting terintegrasi Provinsi Bengkulu.



PEMBANGUNAN: Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis daerah penyusunan Teknokratik RPJMD Provinsi Bengkulu 2021-2025.



BAHAS: Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu.

KUNJUNGAN: Kunjungan Mitra dari provinsi lain, Kunjungan Bappeda Lubuklinggau.



PENGHARGAAN: Terbaik II Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2020.



RAPAT: menggelar Rapat Koordinasi Gubernur (Rakorgub) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bersama Menteri PPN.



PEMBANGUNAN: Pelatihan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Bengkulu dan Implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).



PENGUMUMAN: Kick Of Meeting dalam rangka penyusunan Pengumuman Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).



MUSRENBANG: Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan penyusunan jadwal Musrenbang Provinsi Bengkulu 2020.



SOSIALISASI: Sosialisasi Permendagri Nomor 90.



PENILAIAN: Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahap III.



PELAKSANAAN: Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).



WAWANCARA: Wawancara Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD).



PELAKSANAAN: Sosialisasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Usai Berdamai, Bacok Sepupu

Diduga Dipicu Masalah Utang

KEPAHIANG - Warga Kelurahan Pensiunan Kecamatan Kepahiang, sekitar pukul 10.30 WIB kemarin (22/12) dibikin geger lantaran Ar (12), remaja asal Desa Babakan Bogor, Kecamatan Kepahiang, bersimbah darah. Korban mengalami sejumlah luka akibat dibacok oleh AS (16), warga Desa Pelanggian Kecamatan Kepahiang yang tak lain sepupunya sendiri. Oleh warga korban dilarikan ke RSUD Kepahiang guna mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pasalnya akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami pendarahan serius di bagian kepala dan bahu. Kejadian berdarah ini bermula ketika korban datang ke rumah

orang tuanya AS sambil marah-marah lantaran tak terima utangnya ditagih. Mendapati orang tuanya dimarahi, AS menemui korban hingga terjadi cekkok mulut. Tak berlangsung lama karena dipisah oleh keluarga AS. Hingga akhirnya, kemarin (22/12), kedua orang tua AS dan orang tua Ar sepakat mendamaikan keributan antar anak itu. Hanya saja, dalam musyawarah damai di kantor Kelurahan Pensiunan, korban tidak hadir. Hanya AS, orang tuanya dan orang tua korban yang hadir. Usai musyawarah damai tersebut, orang tua AS dan orang tua Ar pun pulang ke rumah masing-masing. Selanjutnya AS pun berencana ke pasar terlebih dahulu. Singkat cerita, AS kemudian bertemu korban di tengah jalan. Saat bertemu keduanya kembali terlibat cekkok. AS yang sudah ke-

sal, akhirnya langsung membacok korban dengan pisau ukuran besar yang menyerupai golok yang memang diselipkan di pinggangnya. Akibatnya, korban pun bersimbah darah. AS kemudian melarikan diri. Kapolres Kepahiang AKBP. Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu. Welliwanto Malau, S.IK, MH membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya AS sudah diamankan oleh pihaknya guna mengantisipasi konflik lanjutan dari keluarga korban yang tidak terima atas kejadian ini. "Saat ini tersangka dan barang bukti sudah kita amankan. Sementara korban masih mendapatkan perawatan intensif di RSUD Kepahiang. Kita masih lakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai perkara ini, dan apa motif sebenarnya," ujar Kasat Reskrim. (sly)



DIRAWAT: Korban Ar (12), saat mendapatkan perawatan medis di RSUD Kepahiang. Tampak juga tersangka pembacokan, AS (16) diperiksa polisi.

PPTK Mundur, Dewan Khawatir

KEPAHIANG - DPRD Kabupaten Kepahiang menyoroti informasi mengenai mundurnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang mengerjakan proyek pembangunan jalan Paket II Cinto Mandi - Langgar Jaya - Damar Kencana. Dimana proyek ini dibiayai oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 18,5 miliar. Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang, Ansori, M mengungkapkan, mundurnya PPTK proyek tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada keberlanjutan pekerjaan pembangunan. Ia mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi secara langsung dari PPTK yang bersangkutan, yang menyatakan resmi mengundurkan diri dari pekerjaan proyek pada 24 November lalu, sejak mulai melakukan pekerjaan pada 24 April 2020 lalu. Dengan demikian, terhitung 25 November 2020 lalu, eks PPTK tersebut menyatakan tidak lagi bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut. Diketahui PPTK tersebut sebelumnya bertanggung jawab atas kegiatan pembangunan jalan Paket II Cinto Mandi - Langgar Jaya - Damar Kencana dengan surat kontrak nomor: 600/082/KNTRK/Bid.2/DPUPR/KPH/2020 tanggal 23 April 2020. Selain itu, PPTK tersebut juga bertanggung jawab atas pembangunan peningkatan jalan kabupaten penghubung Desa Bandung Jaya - Simpang Air Les dan peningkatan jalan Renah Kurung - Batu Bandung nomor: 600/083/KNTRK/Bid.2/DPUPR/KPH/2020 tanggal 23 April 2020. "Kita mempertanyakan terkait dengan pekerjaan peningkatan infrastruktur yang dibiayai oleh SMI itu, diketahui kontraknya berakhir pada 24 November lalu. Bahkan, sampai PPTK sebelumnya mengundurkan diri, terlepas persoalan tersebut, kita ingin Dinas PUPR menyampaikan kejelasan terkait pekerjaan itu," jelas Ansori. Dijelaskan Ansori, pihaknya mempertanyakan terkait dengan progress pekerjaan pinjaman daerah saat ini dapat diselesaikan sebelum masa akhir tahun atau tidak. Jikapun harus dilakukan perpanjangan waktu pengerjaan atau adendum waktu, Dinas PUPR menurutnya dapat memastikan sesuai target atau tidak. "Kita mau adanya kejelasan dari Dinas PUPR, mengingat ini sudah akhir tahun, kalau adendum harus dipastikan dengan waktu tersebut selesai atau tidak. Kemudian, bukankah pekerjaan pinjaman daerah itu harus diselesaikan sebelum masa jabatan bupati berakhir," jelasnya. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rudi Andi Sihalo, ST membenarkan jika PPTK pekerjaan pinjaman daerah sebelumnya mengundurkan diri pada 24 November 2020. Iapun mengakui jika kontrak pekerjaan yang dibiayai oleh pinjaman daerah tersebut berakhir pada tanggal 24 November. "Iya memang benar, PPTK sebelumnya Iwan Setiawan, ST mundur dan tidak bisa kita paksaan, itu tidak masalah dan PPTK diganti. Terkait dengan pekerjaan sudah dilakukan adendum perpanjangan waktu sampai dengan 13 Februari 2021," jelas Rudi. Rudi memaparkan, progres pengerjaan peningkatan jalan eks KTN A - Barat Wetan saat ini sudah mencapai 40 persen, pembangunan jalan Desa Sosokan Cinta Mandi - Langgar Jaya - Damar Kencana 14 persen dan pembangunan jalan Desa Renah Kurung - Batu Bandung - Bandung Jaya - Simpang Air Les 28 persen. "Perpanjangan waktu ini diyakini agar pihak ketiga dapat menyelesaikan pengerjaan, ini pun disesuaikan dengan kontrak pinjaman daerah. Sementara rencana perpanjangan tenor yang direncanakan Pemkab saat ini belum diketahui pasti," singkat Rudi. (sly)

Bunga Bangkai Mekar di Lahan Konservasi



MEKAR: Holidin serta rekannya berfoto dengan bunga bangkai yang mekar di lahannya, kemarin (22/12).

KEPAHIANG - Bunga Bangkai (*Amorphophallus Titanium*) mekar sempurna di lahan konservasi LP2L2 milik Holidin, warga Desa Tebat Monok Kepahiang. Disampaikan Holidin, Bunga mekar sempurna kemarin (22/12) sekitar pukul 10.00 WIB. "Beberapa pengunjung sudah berdatangan sejak tadi (kemarin, red) siang," kata Holidin. Dia mengatakan, bahwa bunga *Amorphophallus Titanium* setinggi lebih dari satu meter tersebut biasanya akan mulai layu 2-3 hari setelah mekar. Setiap bunga langka itu mekar, lokasi dibuka untuk masyarakat umum. Pengunjung bisa memberikan sumbangan sukarela untuk menikmati bunga langka tersebut. "Kami menyediakan kotak sumbangan sukarela untuk perawatan area penangkaran," kata Holidin. Selain jenis *Amorphophallus Titanium*, di area yang lebih kurang tiga hektare ini juga menjadi pusat konservasi pupsa langka lainnya. Diantaranya *Rafflesia Arnoldi*, *Amorphophallus Gigas*, *Amorphophallus Muellieri* dan lainnya. "Kami melestarikan bunga langka ini murni karena kecintaan kami dengan pupsa langka khas Bengkulu agar bisa dikenal masyarakat luas," pungkas Holidin. (sly)

Bupati Dapat Jaminan Kematian

Rp 2,5 Juta Per Bulan
KEPAHIANG - APBD Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2021 telah disetujui oleh Gubernur Bengkulu, dan sudah bisa diterapkan terhitung awal tahun 2021 mendatang. Walaupun secara umum, tidak ada perubahan yang signifikan dalam pagu anggaran, namun ada beberapa pengeluaran baru yang di alokasikan dalam APBD 2021 mendatang. Adalah anggaran jaminan kematian bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sesuai dengan instruksi pemerintah pusat melalui gubernur Bengkulu untuk mengalokasikan dana jaminan kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Ya, sesuai catatan dalam evaluasi APBD kita dari gubernur, bahwa Kabupaten Kepahiang wajib mengalokasikan anggaran jaminan kematian dan jaminan kerja bagi bupati dan wakil bupati. Kemarin memang sempat kita wacanakan untuk dianggarkan, namun karena besarnya defisit sehingga anggarannya terpaksa dirasionalisasi," terang Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE, M.Si. Selain mengenai jaminan kematian kepala daerah dan wakil kepala daerah, sambilan, gubernur juga memberikan catatan kepada Pemkab Kepahiang untuk mengurangi perjalanan dinas, sesuai dengan Perpres 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. "Kemudian kita juga mendapat catatan untuk memperbanyak pagu anggaran untuk penanganan Covid-19. Dan pada APBD tahun 2021 mendatang, kita sudah alokasikan Rp 2 miliar dalam Belanja Tak Terduga (BTT) untuk bencana non alam. Kenapa kita masukkan dalam BTT, karena agar birokrasi pengeluaran keuangannya tidak rumit," terang Aan. (sly)

Paripurna Hasil Reses Dewan Sepi Pejabat

KEPAHIANG - Ada pemandangan menarik dari rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada masa sidang III Tahun Anggaran 2020, kemarin (22/12). Dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang, hanya 15 pejabat OPD yang hadir mendengarkan hasil reses dewan. Padahal hasil reses ini sangat penting diketahui oleh OPD, sebelum akhirnya menjalankan program kerja di tahun anggaran 2021. Sepinya pejabat OPD yang hadir disayangkan oleh mayoritas anggota DPRD Kepahiang. Bahkan anggota DPRD dari Dapil III Kecamatan Ujan Mas dan Merigi, Joko Triono sempat menyentil hal tersebut dalam penyampaian hasil reses. "Banyak OPD tidak hadir. Jadi saya kurang semangat membacakan laporan hasil



SEPI: Rapat paripurna dengan agenda laporan hasil reses dewan, kemarin (22/12), tampak sepi dan hanya dihadiri beberapa pejabat OPD saja.

reses ini," sentil Joko sebelum membacakan laporannya. Pernyataan serupa juga dikemukakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Andrian Defandra, SE, M.Si yang memimpin jalannya rapat paripurna. Aan, sapaan akrabnya, berkomentar bahwa pihaknya sudah sering menyampaikan keluhan terkait minimnya kehadiran para kepala OPD maupun perwakilan dalam setiap rapat paripurna. "Sepertinya OPD di Kabupaten Kepahiang ini sudah mulai kurang merespon kinerja DPRD Kepahiang. Untuk itu kami sarankan kepada Bupati, kedepan agar bisa mengevaluasi kinerja OPD masing-masing. Kepala OPD yang tidak maksimal kerjanya, silakan diganti," ketus Aan. Kekecewaan serupa juga muncul dari Wakil Bupati Kepahiang, Netti Herawati,

S.Sos yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Menurutnya tidak ada perubahan dari perilaku Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang sejak masa jabatannya 2016 hingga saat ini. Padahal paripurna hasil reses, sambung Netti, merupakan pintu masuk dari perencanaan program ke depan yang memang benar-benar menjadi aspirasi masyarakat. "Kita tetap selalu mengimbau kesadaran para pejabat OPD ini. Jangan selalu menjaga kebiasaan yang buruk. Mulailah membangun kebiasaan baru, yang benar-benar produktif untuk masyarakat. Padahal pada paripurna ini, kita dari eksekutif hanya mendengarkan penyampaian hasil reses, dan ini sangat penting untuk pembangunan daerah kedepan," pungkas Netti.

Diketahui, dari hasil reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada tanggal 14-15 Desember 2020 lalu, ada beberapa hal yang masih diharapkan masyarakat bisa diakomodir oleh Pemkab Kepahiang, mulai dari sektor infrastruktur seperti perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan dan drainage. (sly)

JUAL & ISI ULANG
TABUNG ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR) | GUARANTEED

CEGAH KEBAKARAN DI RUMAH ANDA???

GUNAKAN APAR

- Aman
- Praktis
- Ekonomis

Kami Siap Antan Ke Rumah Anda

-0813 6778 7901
-0812 6169 4484
-0823 76 777776
-0736 52881

PROMO PALING MURAH
DISKON PALING BESAR Agung TOYOTA

Agya Angsuran 2,6 Jt
Calya Angsuran 2,7 Jt
Avanza Angsuran 3,5 Jt
Pick Up Hilux Angsuran 4,9 Jt
Dyna Dump Truck Angsuran 8 Jt
Rush Angsuran 4,4Jt
Innova Angsuran 5,6Jt
Fortuner Angsuran 8,5Jt

Promo Paling Murah | Discon Paling Besar | Buruan Hanya dibulan ini!

Jangan Malu Bertanya Yaa...
Melayani Pemesanan Mobil, Booking Service dan info Spare Part
Proses Cepat & Mudah Bertabung Hadiah!

Minat...??? Hubungi Anto, S.Sos
HP/WA : 0852 6869 8619
Facebook : Irwanto SSOS

SH. TRUSS

RANGKA ATAP
BAJA RINGAN / KUDA - KUDA METAL
PENGGANTI KAYU

- SH. TRUSS bebas perawatan
- SH. TRUSS Kuat, Ringan, dan Anti Gempa
- SH. TRUSS terbuat dari ZINCALUME / ALUZINC
- SH. TRUSS di jual batangan

Hubungi **SINAR HARAPAN**
Jl. Kinibalu No.67 Kebun Tebeng Bengkulu
Tlp. (0736) 21653, Hp. 0822 7838 6870

PT. NURTANI JAYA
Jual Beli Mata Uang Asing

Alamat: Jl. Soeprpto No.1
Telp: 0736- 343017
"Depan Bank UOB"

LINTAS

Pembangunan Gedung MPP Batal

BENTENG - Rencana pembangunan gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) yang direncanakan pada tahun 2021 mendatang batal dilaksanakan. Hal ini dikarenakan anggaran yang terbatas.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Benteng, Nirzawan mengatakan, untuk pembangunan gedung MPP belum direalisasikan pada tahun 2021. Selain anggaran terbatas, Pemkab Benteng masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang belum diselesaikan pada tahun 2020 dan pembangunan infrastruktur yang dinilai sangat penting.

"Memang pada APBD tahun 2021 mendatang, kita Pemkab Benteng masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ada di Benteng seperti menyelesaikan pembangunan yang belum selesai seperti Gedung Kancing, Gedung Dekranasda, Pembangunan Pendopo, Pembangunan Masjid Raya, pembangunan jalan dan sebagainya," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk khusus Dinas PUPR mendapatkan anggaran Rp 89 miliar untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Benteng. "Kemudian juga, anggaran diplot ke dalam pemulihan perekonomian masyarakat dan untuk pencegahan maupun penanganan covid 19 yang saat ini masih mewabah di Kabupaten Benteng," Demikian Nirzawan.

Dalam rencana pembangunan MPP ini, Untuk diketahui, Pemkab Benteng sudah melakukan kunjungan ke Palembang dan Lampung untuk melihat pelayanan MPP disana. Kemudian selain itu jugam Pemkab Benteng juga sudah menentukan lokasi pembangunan MPP tersebut, yakni lahan yang berada belakang kantor Bupati Benteng yang Desa Ujung Karang. Selain itu juga Pemkab Benteng juga sudah menjalin komunikasi dengan pihak ketiga perihal untuk kerja sama dalam menjalankan fungsi MPP tersebut. (jee)



APEL: Polres Benteng menggelar apel Operasi Lilin Nala 2020.

Tempat Wisata jadi Perhatian

BENTENG - Pemkab Bengkulu Tengah (Benteng) bersama Polres Benteng menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral Operasi Lilin Nala tahun 2020. Rapat ini dihadiri perwakilan Asisten I, Polres Benteng, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Kapolres Benteng, AKBP. Ary Baroto S.Ik, MH melalui Kabag Ops, AKP Januri Sutirto, SH mengatakan, dalam persiapan operasi lilin nala 2020 tentunya sangat berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan, diketahui bersama, sampai saat ini pandemi Covid-19 masih melanda Provinsi Bengkulu terkhusus Kabupaten Benteng.

"Sehingga, perlu persiapan dan koordinasi di lintas sektoral agar menjamin jalannya operasi tersebut sehingga nantinya tetap mengedepan atau memperhatikan protokol kesehatan (prokes). sebab jangan sampai dengan adanya penyambutan malam Nataru ini bisa menjadi boomerang bagi Benteng yang mengakibatkan penambahan kasus bertambah banyak," ungkapnya.

Dia menambahkan, yang menjadi perhatian dalam operasi lilin nala 2020, beberapa titik yang berada wilayah Benteng, khususnya terdapat banyak destinasi wisata seperti Wahana Surya, Sungai Suci, Bukit Kandis dan beberapa tempat lain yang akan menjadi tempat berkumpulnya para anak muda dalam merayakan penyambutan Nataru.

"Sehingga dengan begini kita akan menyiapkan beberapa personil kita yang akan kita tugaskan di beberapa titik objek wisata tersebut. sesuai SE Bupati juga, kalau dilarang melakukan perayaan Nataru dengan mengumpulkan dengan jumlah massa yang banyak. Maka dari itu tempat wisata ini akan kita awasi dan tempatkan personil nantinya," jelasnya.

Sementara itu, Asisten I Benteng, Drs. H Fajrul Rizki, MM menyampaikan, kegiatan operasi lilin nala sangat mendukung penerapan prokes Covid-19. Sehingga Pemkab Benteng akan siap membantu dalam menggelar kegiatan operasi lilin nala 2020 tersebut. karena semua ini kegiatan ini kepentingan dan kesehatan bersama.

"Kepada semua warga Benteng, kita imbau dan meminta untuk mematuhi semua peraturan yang sudah tertera di SE Bupati, untuk melarang kita merayakan penyambutan Nataru. Semua ini dilarang bukan tanpa alasan, sebab saat ini kita masih dalam masa pandemi Covid-19 dan status kasusnya juga masih bertambah hingga saat ini," Tutup Fajrul. (jee)

GUNAKAN OLI YANG JELAS SUMBERNYA
 Hubungi: **PT. TRI GADING MAKMUR**
 Distributor Resmi Pelumas Pertamina
 Jl. Seruni No. 33 Nusa Indah Kota Bengkulu
 Telp/Fax : 0736 - 22016 / 26531
 Email : tgm_bengkulu@yahoo.co.id

WHATEVER YOUR ENGINE
 PERTAMINA PELUMAS



RAPAT PIMPINAN: Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi, S.TP memimpin rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran tahun 2020 diikuti semua OPD.

Serapan Anggaran, 6 OPD Rapor Merah

Serapan Anggaran BPBD Hanya 10,71 Persen

BENTENG - Pemkab Bengkulu Tengah (Benteng), kemarin (22/12) menggelar rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TERPA) tahun anggaran 2020 ini. Dalam rapat digelar tersebut diketahui ada enam Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mendapatkan rapor merah. Realisasi serapan anggaran dari enam OPD itu tergolong rendah, yakni di bawah 66,39 persen.

Kemudian, untuk OPD yang berada di zona kuning yang serapannya diantara 66,4 persen hingga 74,7 persen atau setingkat di atas zona merah ada lima OPD. Kemudian zona hijau yang serapannya di angka 74,7 persen hingga 83 persen ada 16 OPD. Terakhir, serapan paling tinggi atau zona biru di angka serapan 83 persen hingga 100 persen ada 21 OPD. Untuk persentase perhitungan ini, merupakan serapan anggaran disetiap OPD per 30 November.

Wakil Bupati Benteng, Septi Peryadi, S.TP membenarkan hal itu. Keenam OPD tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan serapan anggaran hanya 10,71 persen, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) hanya 34,46 persen.

"Kemudian ada juga Bagian Hukum hanya menyerap anggaran 44,29 persen Bagian Pemerintahan hanya menyerap 65,36 persen, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) hanya menyerap anggaran 55,71 persen, terakhir Bagian Pengadaan Barang dan Jasa hanya menyerap anggaran sebesar 57,92 persen. Penilaian keenam OPD ini persentasenya masih kecil dilihat dari pagu anggaran yang tersedia dimasing-masing OPD," jelasnya.

Dia menambahkan, yang menjadi catatan dan evaluasi ke depan bukan hanya yang berada di zona merah, namun zona kuning juga menjadi bahan evaluasi untuk ke depannya agar tidak terjadi lagi serapan anggaran yang masih rendah. Dari hasil rapat yang dilakukan kemarin,

memang ditemukan beberapa kendala yang menjadi penyebab mengapa serapan anggaran masih rendah.

"Seperti di salah satu OPD, ada yang pekerjaan fisiknya sudah selesai namun pembayaran kepada pihak ketiga belum dilakukan. Kemudian ada juga OPD yang terhambat tidak bisa melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan banyak massa pada saat sedang mewabahnya Covid 19 beberapa waktu lalu, sehingga diundur hingga bulan Desember ini," ungkapnya.

Sambung Septi, ada juga beberapa OPD yang kegiatannya dilaksanakan pada bulan Desember, sehingga serapan masih rendah. Namun memang persentase perhitungan ini per 30 November, sehingga masih ada waktu satu bulan untuk melakukan penyerapan anggaran, bagi yang belum melaksanakan kegiatan, belum melakukan pembayaran terhadap kerja sama dengan pihak ketiga.

"Semoga hingga akhir bulan Desember nantinya, OPD yang belum berada di zona biru tersebut tidak ada lagi yang berada di zona merah, zona kuning ataupun zona hijau dan bisa naik angka serapannya hingga di persentase 83 persen hingga 100 persen atau berada di zona biru. Semua saran dan masukan sudah kita sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan evaluasi kedepannya," demikian Septi.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Benteng, Drs. Jaka Santoso mengakui serapan di OPD Bagian Pemerintahan masih rendah dan berada di zona merah. Salah satu pemicunya, karena tidak bisa terlaksananya acara yang mengumpulkan banyak orang beberapa waktu lalu. sehingga semua kegiatan banyak diundur hingga bulan November dan Desember.

"Pada bulan November lalu kita baru mengadakan satu acara yang berhubungan dengan Kepala Desa dan BPD. Kita optimis hingga akhir bulan Desember ini untuk serapan anggaran yang ada di OPD kita akan menembus diangka 90 persen lebih atau berada di zona biru," Tutup Jaka. (jee)

Target Pajak Tempat Hiburan Rawan Tak Tercapai

BENTENG - Dari data Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Benteng, diketahui jika saat ini baru satu objek pajak yang sudah membayarkan Wajib Pajak (WP) kepada Pemkab Benteng. Sehingga dengan situasi ini, membuat target pajak

hiburan sebesar Rp 46,2 juta pada tahun 2020 terancam tidak akan tercapai.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan, BKD Benteng, Dessy Aprianti, SH. Ia mengatakan, memang hanya wisata Wahana Surya yang membayarkan WP hiburan kepada BKD, sebesar Rp 30 juta. Dari total target pajak yang ditetapkan sebesar Rp 46,2 juta tersebut, masih ada kekurangan sebesar Rp 16,2 juta lagi untuk mencapai target tersebut.

"Sedangkan untuk Buana Alit, sudah ada mengirimkan surat kepada kita akan segera membayar pajak air bawah tanah kepada kita. Untuk tercapai atau tidaknya target pajak hiburan ini, kita BKD akan tetap berusaha hingga akhir Desember," tegasnya.

Kemudian untuk proyek di depan target tambahan WP hiburan, BKD sudah memasukkan Wisata Danau Gedang di Desa Padang Betuah. "Kita BKD akan melakukan pendekatan dan berkoordinasi dengan pihak pengelola perihal rencana memungut pajak hiburan di Wisata Danau Gedang tersebut," Pungkasnya. (jee)



KOMPAK: Bupati Benteng, Dr. Ferry Ramli, MH terlihat kompak bersama pimpinan DPRD Benteng, usai penge-sahaan APBD 2021.

Tiga OPD Dapat Anggaran Tertinggi

Disahkan, APBD 2021 Sebesar Rp 830 Miliar

BENTENG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 sudah disahkan menjadi Perda dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi di DPRD Benteng, Senin (21/12) malam.

Untuk diketahui, jika APBD Kabupaten Benteng pada tahun 2021 mendatang mencapai Rp 830 miliar, dengan tiga OPD terbesar yang mendapatkan anggaran tertinggi. Yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUUR).

Selain itu, dari ke 7 fraksi yang ada di DPRD Benteng, telah menyetujui Raperda APBD Kabupaten Benteng tahun anggaran 2021. Dalam Paripurna Semua fraksi mengharapakan nantinya antara legislatif dan eksekutif akan tetap saling bekerja sama dan semua kegiatan yang telah di programkan serta di anggarkan dapat terealisasi dengan baik guna mensejahterakan masyarakat Benteng.

Bupati Benteng Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH mengungkapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua fraksi di DPRD yang telah menyetujui Raperda APBD kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Meskipun dengan keterbatasan waktu dan permasalahan yang terjadi, akhirnya dapat di rangkum serta mendapatkan komitmen bersama.

"Semoga Raperda APBD 2021 dapat bermanfaat untuk pembangunan Kabupaten Benteng yang lebih maju kedepannya. Dalam Raperda APBD bukan hanya anggaran dari pemerintah pusat saja yang harus kita optimalkan dengan baik, tetapi sumber-sumber pendapatan daerah pun juga harus dioptimalkan dengan baik, sehingga kita

sebagai pelayan masyarakat harus proaktif dalam memajukan roda pemerintahan," jelasnya.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bengkulu Tengah (Benteng), Welldo Kurniyanto, SE, MM melalui Kabid Anggaran, Ade Christian, S.STP, M.Si mengatakan, secara keseluruhan belanja anggaran pada tahun dengan mencapai Rp 830.034.208.073. Sementara dari sisi pagu anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dikbud mendapatkan anggaran terbesar dengan nominal Rp 180 miliar.

"Kemudian diikuti Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp 100 miliar dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) hanya Rp 89 miliar. Lebih besarnya anggaran Dikbud dibandingkan dengan Dinas PUPR, disebabkan telah termasuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi bagi guru, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non fisik," ungkapnya.

Dia menambahkan, kalau Dinkes ada penambahan dana BOK, sedangkan untuk Dinas PUPR pada tahun 2021 mendatang, untuk anggaran DAK diketahui mengalami penurunan. "Jadi Dikbud dan Dinkes berada diatas Dinas PUPR bukan tanpa sebab dan alasan, karena memang sudah termasuk gaji, semua tunjangan guru sertifikasi maupun non sertifikasi, hingga anggaran DAK," ujarnya.

Ketua DPRD Benteng, Budi Suryantono, S.Sos menjelaskan, untuk penggunaan anggaran, ia berharap kepada Pemkab Benteng dan OPD terkait untuk benar-benar memaksimalkan anggaran yang ada.

"Memang anggaran pada tahun 2021 mengalami penurunan namun bukan menjadi alasan untuk kita tidak bekerja secara maksimal, terkhusus dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan covid-19 yang ada di Benteng," Pungkasnya. (jee)



LINTAS

Gedung PMI RL Bakal jadi RS Darurat



HIJAZI

CURUP - Bupati Rejang Lebong (RL) Dr. H. Ahmad Hijazi, SH, M.Si mengungkapkan, keberadaan gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten RL yang direncanakan menjadi Rumah Sakit (RS) PMI tersebut akan dijadikan salah satu RS Darurat Penanganan COVID-19. Dimana gedung PMI tersebut berada di kawasan Desa Dataran Tapus Kecamatan Bermani Ulu Raya (BUR).

Hal ini, sampai Bupati Hijazi, berdasarkan dari hasil rapat koordinasi (rakor) bersama Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah dan Pemkab RL serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten RL. "Dalam rapat terbatas beberapa hari lalu bersama pak gubernur, disepakati empat lokasi akan ditetapkan sebagai RS Darurat. Dan salah satunya adalah Gedung PMI di Kabupaten Rejang Lebong tersebut," sampai Bupati Hijazi.

Dilanjutkan Bupati Hijazi, untuk tiga lokasi lainnya yang akan dijadikan RS Darurat, ialah Gedung Bapelkes di Kota Bengkulu, Wisma Atlet di Kabupaten Bengkulu Utara, dan rusunawa di Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk itulah mereka akan segera menindaklanjuti kesepakatan tersebut, termasuk menyiapkan anggaran maupun sarana prasarana pendukung guna menekan penyebaran Covid-19 berupa APD dan lainnya.

"Kita juga sedang menyiapkan rancangan Perda penegakan hukum untuk disiplin penerapan protokol kesehatan agar bisasegera disahkan menjadi perda. Untuk PCR kita sudah siap dan Pemprov melalui Dinkes akan mendukung persiapan SDM guna mempersiapkan agar gedung PMI tersebut bisa segera beroperasi sebagai RS Darurat," sambung Bupati. (dtk)

Peran Guru TK Sangat Dibutuhkan

BENGKULU - Peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember, Guru tetap memberikan penerapan prokes pada muridnya walaupun saat ini masih dilanda pandemi Covid-19. Tak terkecuali bagi dunia pendidikan, guru jadi pionir utama saat ini ikut berjuang, dalam memberikan edukasi pentingnya protokol kesehatan (prokes) dianjurkan oleh pemerintah.

Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI) Provinsi, Wisna, S.Pd mengatakan, Guru Taman Kanak-Kanak (TK) juga merupakan seorang ibu, tentunya jiwa keibuannya akan mengalir. Apalagi pembelajaran pada murid TK itu, lebih cenderung kepada karakter, baik itu penanaman perilaku yang lebih ditanamkan oleh dewan guru.

"Dengan adanya pandemi Covid-19 ini, sebagai guru TK merupakan sebuah tugas yang harus diemban oleh mereka sangat luar biasa, yang biasanya belajar tatap muka di sekolah, kini melalui daring (online)," katanya.

Dijelaskannya, murid TK juga sangat rentan dengan terpaparnya Covid-19 ini, maka dari itu, peran guru juga sangat penting, bagaimana mereka memberikan edukasi pada orangtua, murid di rumah ataupun sedang bergian, wajib menerapkan prokes Covid-19. "Tujuan utama lembaga TK ini, bagaimana membina orangtua murid agar memberikan pembelajaran, sesuai tingkat umur, karakter anak itu," tambahnya. (hkm)

WISNA

Distribusikan 10.000 Rapid Test Antigen

BENGKULU - Untuk membuat *screening* awal Covid-19 lebih ketat akurasi, Dinas Kesehatan mendistribusikan bantuan rapid tes antigen sebanyak 10.000 dari BNPB Pusat.

Kabid Yankes Dinkes Provinsi Bengkulu Edriwan Mansyur mengatakan, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan rapid test. "Bantuan tersebut sudah didistribusikan ke Polda, rumah sakit, fasyankes dan pihak-pihak yang membutuhkan," katanya.

Ia menjelaskan, sebanyak 10.000 bantuan tersebut merupakan bantuan dari BNPB pusat dan sudah didistribusikan pihak kepolisian sebanyak tiga ribu, untuk kepentingan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Dinkes Provinsi saat ini sudah membantu dalam pendistribusian rapid test antigen agar pelaksanaannya dapat segera dilakukan bagi pihak-pihak yang memerlukan.

"Sebanyak 10.000 rapid test antigen telah didistribusikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, 3000 alokasikan untuk pihak Polda dan 7000 yang meliputi Dinas Kesehatan kabupaten kota, rumah sakit kabupaten kota dan tiap provinsi dan kabupaten mempunyai kebijakan masing masing sesuai kebutuhan yang di perlukan," paparnya. (hkm)



IKUTI: Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat mengikuti Rapat Pleno TPKAD Provinsi Bengkulu secara virtual meeting, Selasa (22/12)

Peran Strategis TPKAD di Masa Pandemi

BENGKULU - Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengikuti dan menjadi narasumber pada Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Provinsi Bengkulu secara virtual meeting, di ruang Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (22/12). Membahas peran strategis TPKAD dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Dikatakan Rohidin, dalam upaya pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 maka menu jasa keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat selaku konsumen di setiap daerah memerlukan penyesuaian. Disesuaikan dengan kondisi UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan pemahaman masyarakat setempat.

Seperti, dalam hal memberikan akses kredit, pihak perbankan juga harus memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada UMKM dan masyarakat. Bahkan jika diperlukan melakukan pendampingan secara intensif mulai dari pengajuan kredit permodalan hingga pembinaan berkelanjutan. "Kalau hanya diumumkan, kadang masyarakat itu tetap tidak memahami cara mendapatkan akses modal itu seperti apa. Tapi kalau memang ada pendampingan, saya yakin geliat UMKM akan lebih produktif," kata Rohidin.

Rohidin menerangkan, pemulihan ekonomi disaat pandemi Covid-19 sangat ditentukan dengan kolaborasi dan sinergi 3 variabel penting.

Meliputi sektor pelaku usaha, jasa keuangan dan sektor masyarakat/konsumen. Terlebih sektor pelaku usaha dan konsumen, akan semakin berinteraksi secara timbal balik dengan sektor jasa keuangan.

"Maka di sinilah peran strategis TPKAD memberikan fasilitas dan ruang pembinaan kepada 3 variabel pemulihan ekonomi tersebut," tukasnya.

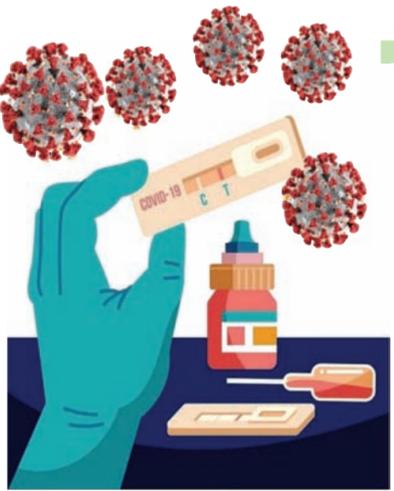
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bengkulu Tito Aji, menyampaikan, keberadaan TPKAD merupakan implementasi dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari OJK sendiri maupun lembaga jasa keuangan daerah

di Bengkulu, akan senantiasa memberikan pelayanan akses keuangan terbaik bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk diketahui, dari survey BPS Bengkulu hingga semester III 2020, 84 persen UMKM mengalami penurunan pendapatan, 78,35 persen UMKM mengalami penurunan permintaan karena pelanggan yang terkena dampak Covid-19. Selanjutnya 56,85 persen UMKM di Bengkulu mengalami kendala bisnis akibat tidak bisa beroperasi secara normal, 62,21 persen UMKM mengalami kendala keuangan terkait pegawai dan operasional dan 33,23 persen UMKM melakukan pengurangan jumlah pegawai. (key)

PERBEDAAN RAPID TEST ANTIGEN DAN ANTI BODI

RAPID TEST ANTIGEN	tersebut dalam tubuh seseorang.	Hasilnya lebih AKURAT DAN SPESIFIK dibandingkan rapid test antibodi.
<ul style="list-style-type: none"> Tes untuk mengidentifikasi orang yang TERINFEKSI VIRUS CORONA Caranya dengan mendeteksi ADA-NYA MATERI GENETIK ATAU PROTEIN SPESIFIK dari virus 	<ul style="list-style-type: none"> Sampel yang diambil adalah LENDIR DARI DALAM HIDUNG MAUPUN TENGGOROKAN dengan metode usap (swab). Sehingga, rapid test antigen terkadang disebut juga dengan swab antigen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tes ini masih kurang akurat jika dibandingkan DENGAN PCR. Hasil tes ini bisa didapatkan sekitar 15 HINGGA 30 MENIT.



RAPID TEST ANTI BODI
<ul style="list-style-type: none"> Rapid test antibodi adalah tes diagnostik cepat Covid-19 yang dijalankan untuk mendeteksi keberadaan ANTIBODI DALAM DARAH. Ketika terinfeksi corona, tubuh akan menghasilkan ANTIBODI DALAM BEBERAPA HARI atau pekan kemudian jadi yang di lihat hanya DNA virusnya. Anti bodi ini hanya untuk melihat peningkatan ANTI BODY SESORANG DENGAN KADAR IGE. Cara kerja rapid test antibodi dengan mengambil darah untuk sampel pemeriksaan. Lama waktu yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi dalam tubuh adalah 5 HINGGA 10 MENIT.

Pahami Beda Rapid Test Antigen dan Anti Bodi

BENGKULU - Mengenali Rapid test antibodi untuk deteksi awal infeksi virus corona dan Rapid test antibody untuk mendeteksi adanya antibodi dalam darah orang yang diyakini telah terinfeksi Covid-19.

Kepala Bidang P2P Dinkes Provinsi Bengkulu Lisyenti Bahar mengatakan, rapid test antigen adalah tes untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi virus corona dengan mendeteksi adanya materi genetik atau protein spesifik dari virus tersebut dalam tubuh seseorang.

Ia menjelaskan, Sampel yang diambil adalah lendir dari dalam hidung maupun tenggorokan dengan metode usap (swab). Sehingga, rapid test antigen terkadang disebut juga dengan swab antigen.

"Tes ini bisa dikatakan lebih akurat dan spesifik dibandingkan rapid test antibodi karena mengidentifikasi virus dalam sekresi hidung dan tenggorokan," jelasnya.

Namun, tes ini masih kurang akurat jika dibandingkan dengan PCR. Hasil tes ini bisa didapatkan hanya dalam waktu

hitungan menit saja biasanya sekitar 15 hingga 30 menit. Tingkat keakuratan hasil rapid test antigen jika seseorang dinyatakan positif terinfeksi virus corona biasanya tinggi. Meski demikian, tetap ada kemungkinan hasil tes positif palsu.

"Sementara untuk hasil negatif sebaliknya masih dilakukan tes PCR untuk mengetahui hasilnya secara lebih akurat," paparnya.

Sedangkan untuk Rapid test antibodi adalah tes diagnostik cepat Covid-19 yang dijalankan untuk mendeteksi keberadaan antibodi dalam darah. Ketika terinfeksi corona, tubuh akan menghasilkan antibodi dalam beberapa hari atau pekan kemudian jadi yang di lihat hanya DNA virusnya. "Jadi anti bodi ini hanya untuk melihat peningkatan anti body seseorang dengan kadar Ige," jelasnya.

Cara kerja rapid test antibodi dengan mengambil darah untuk sampel pemeriksaan. Lama waktu yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya antibodi dalam tubuh adalah 5 hingga 10 menit. (hkm)



RAZIA: Tim satgas semakin gencar dalam menggelar razia kesetiap pelaku usaha yang ada.

178 Pelaku Usaha dan Perorangan Terjaring Razia

BENTENG - Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), pada bulan Desember ini terus melaksanakan razia yustisi penegakan peraturan bupati (Perbup) nomor 37 tentang penegakan hukum kedisiplinan masa pandemi Covid-19. Total dari 12 kali razia yang dilaksanakan, diketahui sudah 178 pelaku usaha dan perseorangan yang disanksi lantaran dinilai tidak taat prokes dan tiga diantaranya dikenakan sanksi denda.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Benteng, Gunawan R, SE, MM mengatakan, selama 12 kali digelar razia selama bulan Desember ini diketahui sudah 178 yang terjaring dalam razia. 178 ini terdiri dari, sanksi teguran lisan sebanyak 119, teguran tertulis 56 dan dikenakan denda administratif sebanyak tiga. Tiga yang dikenakan sanksi tersebut merupakan pelaku usaha yang tetap tidak taat dalam penerapan prokes sehingga diberikan sanksi denda Rp 500 ribu.

Dia menambahkan, dalam razia yang digelar ini, tim satgas melaksanakan merata ke sejumlah titik dan tidak pandang bulu. Seperti objek wisata ataupun perusahaan

yang beroperasi di Benteng, diantaranya Danau Gedang, Wahana Surya, Pantai Sungah Suci, Indomaret, Alfamart, Perbankan, kawasan liku sembilang, perusahaan yang ada di Benteng dan pelaku usaha lain di sekitarnya.

"Khusus bulan Desember ini memang difokuskan pada wisata, pelaku usaha ataupun fasilitas umum lain yang notabene banyak dikunjungi masyarakat banyak. Karena memang sama-sama kita ketahui untuk saat ini kasus covid-19 di Benteng kembali mewabah dan sejak bulan November hingga Desember ini kita gelar razia, memang kesedaran masyarakat masih sangat minim untuk disiplin dalam menggunakan masker," tegasnya.

Lanjutnya, semua ini dibuktikan dengan jumlah warga maupun pelaku usaha terjaring razia. Untuk bulan ini saja sudah mencapai 178 yang terjaring, belum lagi ditambah bulan November lalu sudah mencapai 530 orang lebih yang terjaring razia. "Maka dari itu kita selalu meminta kepada masyarakat untuk disiplin dalam menerapkan prokes demi kesehatan bersama." Demikian Gunawan. (jee)